



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN & ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam tahun anggaran 2012, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan 14 (empat belas) sasaran yang akan dicapai. Ke empat belas sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 47 indikator kinerja dengan 47 target kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa keseluruhan sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik, sedangkan dari 47 indikator kinerja dengan 47 target, terdapat 46 target indikator kinerja pencapaiannya berhasil dan 1 target indikator kinerja tidak berhasil. Dari 47 target indikator tersebut, 46 diantaranya merupakan target pada indikator yang mempunyai capaian rata rata diatas 90%.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran LAKIP 2012

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	76% s.d. 100 %	Sangat Baik
2.	51 % s.d. 75 %	Baik
3.	26 % s.d. 50 %	Cukup
4.	Kurang dari 25 %	Kurang

Adapun capaian kinerja sasaran Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2012 terlihat pada form pengukuran kinerja sebagaimana ditentukan dalam Permen PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010. Indikator dan target yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, antara lain:

3.2. Analisis Capaian Kinerja Dari 5 (Lima) Misi Pembangunan

Untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana



pelayanan umum. Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran di atas melalui indikator kinerja dalam misi pembangunan sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Pengukuran Kinerja Misi 1 :
Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum

No.	Sasaran	Indikator	Kondisi awal RPJMD	Target Tahun 2012	Realisasi Tahun 2012	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan umum daerah	– Persentase peningkatan jalan wilayah provinsi dalam kondisi mantap (kondisi baik, sedang, rusak ringan)	40,11	9	12,9	138
2.	Terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan listrik	– %Rasio elektrifikasi – Peningkatan desa yang memakai energi baru terbarukan (PLTMH/ PLTMS)	53,44 9 5.649	65 1 4	89,79 1 4	102 100 100
3.	Terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih	– Optimalisasi jaringan irigasi – Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan – Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	3.727 Ha 51,19 (MDGs) 40,93 (MDGs)	3.727 Ha 44,32 (MDGs) 50,65 (MDGs)	5.996 Ha 44,32 50,65	100 100 100

3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum

3.2.1.1. Sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Umum Daerah

3.2.1.1.1. Indikator Kinerja Persentase peningkatan Jalan Wilayah Provinsi Dalam Kondisi Mantap (kondisi baik, sedang, rusak ringan)

Penanganan infrastruktur di Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2012 difokuskan pada program pembangunan jalan dan jembatan, dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan yang bertujuan untuk meningkatkan arus barang dan jasa serta mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah. Total implementasi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, dimana jalan yang



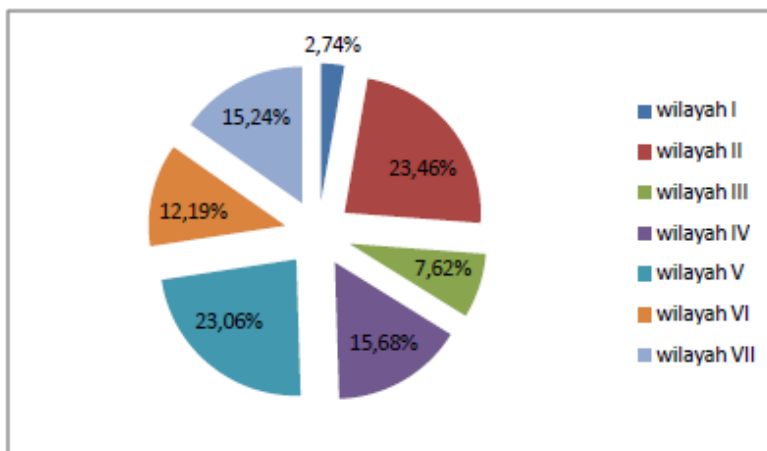
harus ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jambi adalah sepanjang **1.504,929** (seribu lima ratus empat koma sembilan ratus dua puluh sembilan) kilometer.

Dalam rangka mewujudkan jalan Provinsi Jambi dalam kondisi mantap, yang dimaksud dengan “**mantap**” disini adalah kondisi jalan dengan kualitas baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat, maka telah dilaksanakan Program pembangunan jalan dan jembatan dengan anggaran yang didistribusikan menggunakan pendekatan kewilayahan dimana Provinsi Jambi dibagi menjadi 7 wilayah yang terdiri dari :

1. Wilayah I (Kabupaten Tanjab Barat),
2. Wilayah II (Kab. Tanjab Timur dan Ma. Jambi),
3. Wilayah III (Kab. Bungo),
4. Wilayah IV (Kab. Batanghari dan Ma. Jambi),
5. Wilayah V (kab. Merangin),
6. Wilayah VI (Kab. Kerinci) dan
7. Wilayah VII (Kab. Sarolangun).

Khusus distribusi anggaran pembangunan jalan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.1 Distribusi Anggaran Pembangunan Jalan



Salah satu prioritas penanganan infrastruktur jalan adalah membuka keterisolasian wilayah-wilayah produksi pertanian utama yang berada di wilayah Barat dan Tengah Provinsi Jambi. Kegiatan ini juga bertujuan secara tidak langsung untuk mengurai kemandegan (*bottlenecking*) yang

selama ini dianggap menjadi faktor utama rendahnya Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi dan fluktuasi inflasi perdesaan. Oleh karena itu, prioritas penanganan jalan dan jembatan tahun 2012 adalah Peningkatan Ruas Jalan Simpang Pulau Rengas – Jangkat (*Multiyears*); ruas Jalan Bts. Kerinci – Sangg. Agung; Tempino – Ma. Bulian; Simp. Pelawan – Sei. Salak – Pekan Gedang – Ma. Talang dan Jalan Simp. Pudak – Suak Kandis – Desa Simpang.

Program prioritas tersebut menyerap alokasi 45% dari total APBD Kebinaamargaan Provinsi Jambi. Sisanya tersebar di seluruh ruas jalan lainnya. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jalan



dan jembatan yang tersebar di Kabupaten/kota. Sedangkan untuk penanganan jembatan selama tahun 2012 meliputi Pembangunan Jembatan Gantung di Angso Duo (Jembatan Pedestrian) sepanjang 491,5 Meter yang pada tahun 2012 dalam tahap pemancangan tiang pancang dengan alokasi Rp.17 Milyar dan diharapkan selesai pada tahun 2014 melalui kontrak Multy Years. Diharapkan dengan dibangunnya jembatan pedestrian ini dapat meningkatkan perekonomian wilayah seberang Kota Jambi dan meningkatkan sektor industri pariwisata Provinsi Jambi.

Selain itu, untuk mendukung program pembangunan jalan dan jembatan diperlukan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan sebagai upaya mengantisipasi rusaknya kembali fasilitas umum yang telah dibangun tersebut. Secara keseluruhan, penanganan jalan dan jembatan yang telah dilaksanakan adalah peningkatan jalan efektif 237,00 km atau 15,75% dari total panjang jalan Provinsi yang menyerap 85,23% alokasi anggaran Bina Marga tahun 2012 dan pelaksanaan pekerjaan fungsional sepanjang 595,20 km atau 39,55% dari total panjang jalan Provinsi. Dengan total penanganan jalan hanya sepanjang 832,20 km, atau 55,30% terindikasi bahwa APBD 2012 masih jauh dari rasio kecukupan. Padahal di sisi lain laju kerusakan masih cukup tinggi terkait adanya eksploitasi sumberdaya alam yang penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan pemeliharaan semata. Kenyataan ini dapat dilihat pada tabel laporan statistik kondisi jalan hingga bulan Desember 2012 :

Tabel 3.3.
Kondisi Jalan Provinsi Jambi

Total Panjang Jalan Provinsi	Kondisi Jalan Provinsi Jambi (Mantap) : Km			
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.504,929	551,080 (36,618%)	544,915 (39,209%)	280,003 (18,606%)	128,931 (8,56%)

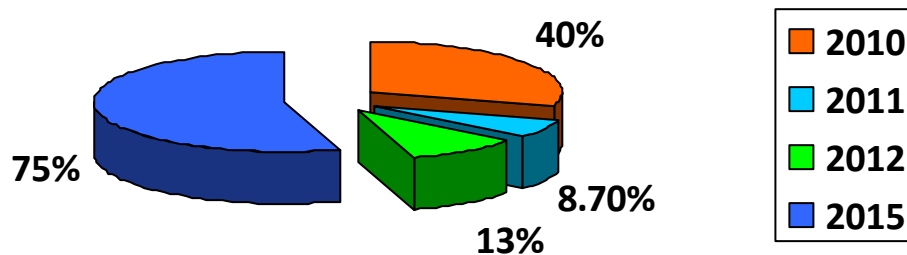
Persentase kenaikan terbesar adalah jalan yang berkondisi baik dengan kenaikan sebesar 2,058% dibanding kondisi Desember 2011 (sebesar 34,560%) Sedangkan jalan yang berkondisi rusak ringan sampai rusak berat turun sebesar 1,267% dibanding periode yang sama tahun 2011. Berdasarkan analisa, rumusan kelayakan rasio kecukupan yang ideal sesuai target RPJMD dengan laju kerusakan seperti saat ini adalah 20 : 80, atau 300,986 km pekerjaan efektif dan 1.203,943 km pekerjaan fungsional/pemeliharaan. Sebagai tindak lanjut penanganan secara berkesinambungan terhadap kerusakan jalan di wilayah Provinsi Jambi, terutama dalam mencapai target kondisi jalan mantap sangat diperlukan adanya upaya pemeliharaan secara rutin.

Dalam upaya mengurangi beban jalan untuk angkutan produksi sumberdaya alam, Pemerintah Provinsi Jambi telah memberlakukan mekanisme pengaturan penggunaan jalan publik bagi angkutan tersebut yang dilaksanakan



pada tahun 2012. Dan mulai tahun 2013, diterbitkan kebijakan pengaturan pengangkutan batubara, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi. Dengan kebijakan ini telah menurunkan laju kerusakan jalan publik, yang selanjutnya dapat meringankan biaya pemeliharaan jalan yang sangat besar dan membebani APBD. Oleh karena itu, perlunya dukungan dan komitmen bersama semua pihak agar dapat mengawasi jalannya Peraturan Daerah ini secara efektif.

Gambar 3.2. Peningkatan Kondisi Infrastruktur Jalan Provinsi Jambi Dalam Kondisi Mantap



Dalam upaya mengantisipasi terhadap tingginya tingkat kerusakan jalan di Provinsi Jambi, diperlukan adanya optimalisasi pemanfaatan alat berat milik Pemerintah. Hingga tahun 2012, Pemerintah telah memiliki alat berat yang siap pakai. Disadari bahwa banyak permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya adalah menghitung kemampuan pekerjaan efektif peningkatan jalan rata-rata beberapa tahun terakhir yang hanya sejumlah 135 kilometer atau hanya sebesar 9,02%, telah memperlihatkan betapa rendahnya kemampuan APBD untuk memberikan keyakinan pemenuhan pencapaian target peningkatan kondisi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD yaitu dari target 73,70% hanya tercapai 72,68%.

Tabel 3.4.
Perbandingan Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas
Infrastruktur Pelayanan Umum Daerah Tahun 2010 s.d. 2012

No	Indikator Kinerja	Tahun		
		Kondisi 2010	2011	2012
1.	Persentase peningkatan jalan wilayah provinsi dalam kondisi mantap	40,11%	8,7%	12,9%

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

Dampak positif dari meningkatnya infrastruktur jalan Provinsi Jambi, yakni telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan pariwisata Provinsi Jambi. Peningkatan pertumbuhan industri dan perdagangan berdampak pada terkendalinya kondisi ketersediaan stock dan harga kebutuhan pangan.



Berdasarkan hasil pemantauan selama tahun 2012, harga kebutuhan pokok bahan pangan cenderung stabil contohnya pada harga gula. Selama tahun 2012 relatif stabil yaitu berkisar antara Rp. 10.000,00 hingga Rp. 12.000,00. Keadaan ini menggambarkan bahwa lancarnya pendistribusian pasokan gula ke Jambi, stabilnya harga (stock yang cukup) yang disebabkan karena akses jalan menuju Provinsi Jambi relatif semakin baik.

Dampak lainnya juga dapat terlihat dalam ruang lingkup pariwisata, salah satu indikator pendukung keberhasilan yang tergambar adalah adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan perkembangan usaha pariwisata di Provinsi Jambi. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2010 tercatat sebanyak 7.751 orang, terjadi peningkatan pada tahun 2011 sebanyak 8.543 orang (10,22%) dan pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan mencapai 9231 orang (8,05%). Begitupun untuk kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) pada tahun 2010 sebanyak 957.760 orang, dan meningkat menjadi 1.122.350 orang pada tahun 2011 (17,19%) dan untuk tahun 2012 kunjungan wisatawan nusantara meningkat sebanyak 1.278.240 (13,89%). Kondisi ini membuktikan bahwa semakin membaiknya akses infrastruktur jalan menuju tempat-tempat wisata sangat mempengaruhi tingkat kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara, dan secara tidak langsung pula berdampak pada tumbuhnya industri pariwisata serta mendongkrak perekonomian industri kecil di Provinsi Jambi.

3.2.1.2. Sasaran Terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan listrik

3.2.1.2.1. Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi

Menyadari bahwa pembangunan infrastruktur energi dan listrik mempunyai akses yang luas terhadap publik, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah membuat rencana dan menetapkan target kinerja energi dan listrik. Mengingat sampai 2012 masih terdapat beberapa desa di Provinsi Jambi yang belum ter-aliri listrik, sementara fasilitas listrik merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat sehingga Pemerintah Provinsi Jambi memprioritaskan desa-desa yang teraliri listrik dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Untuk itu, dalam mewujudkan capaian kinerja menyangkut infrastruktur listrik ditetapkan indikator sebagai variabel ukuran capaian kinerja, yakni Rasio Elektrifikasi.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja peningkatan rasio elektrifikasi, maka dalam Program Pengembangan energi dilakukan dengan melaksanakan :

1. Kegiatan Inventarisasi dan pembinaan Desa Mandiri Energi, yang bertujuan untuk penyediaan data potensi Energi Baru Terbarukan dan terbinanya

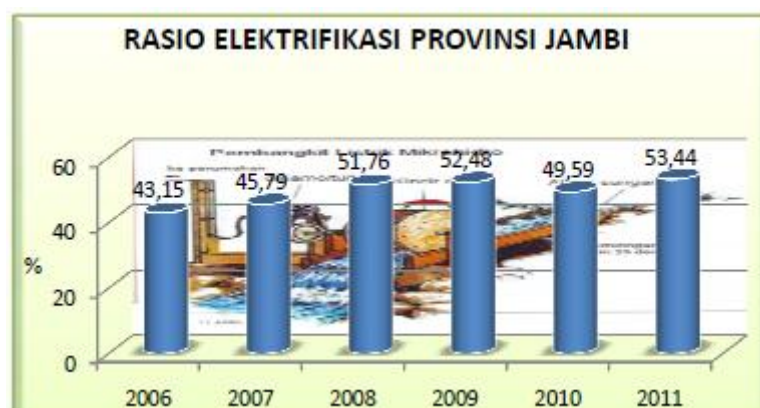


- desa mandiri Energi sehingga tersedia energy alternatif guna mengurangi penggunaan BBM.
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Biogas.
 3. Kegiatan pembinaan dan Pengawasan Pembangunan PLTMH dan Jaringan di Kabupaten Sarolangun.
 4. Kegiatan Inventarisasi Desa belum berlistrik di Provinsi Jambi.
 5. Study Kelayakan potensi Mikrohidro (PLTMH).
 6. Perbaikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan Pembangkit Tenaga Kincir air di Kabupaten Bungo.

Provinsi Jambi dengan jumlah penduduk lebih kurang 3.169.814 jiwa dan yang memperoleh aliran listrik dari PT. PLN (Persero) hanya mencapai 37% dengan total pelanggan 219 ribu. Sistem kelistrikan di Propinsi Jambi sudah terintegrasi dengan Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu. Disamping itu masih terdapat kebutuhan tenaga listrik di Propinsi Jambi yang disuplai dengan sistem yang terisolasi. Beban puncak untuk sistem integrasi di Jambi mencapai 60 MW dan sistem yang terisolasi dengan perkiraan beban puncak 28 MW dengan total konsumsi listrik mencapai 497 GWH. Kapasitas terpasang sistem terisolasi mencapai 147 MW yang disuplai dengan PLTD. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Propinsi Jambi, juga disuplai dengan captive power yang diperkirakan mencapai 280 MVA, yang terdiri dari pembangkit utama sebesar 225 MVA dan 55 MVA sebagai cadangan. Sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan rencana tata ruang daerah telah diperuntukan beberapa daerah sesuai keperluannya seperti daerah pariwisata terdapat di Jambi Bagian Barat, lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan diperuntukan di Propinsi Jambi Bagian Tengah, Jambi Bagian Timur telah dikembangkan menjadi daerah kawasan industri.

Selanjutnya terhadap perkembangan kelistrikan di Provinsi Jambi tergambar rasio elektrifikasi dari tahun 2006 – 2011 terlihat pada diagram berikut :

Diagram 3.1. Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi



Sumber : LKPJ Provinsi Jambi Tahun 2012



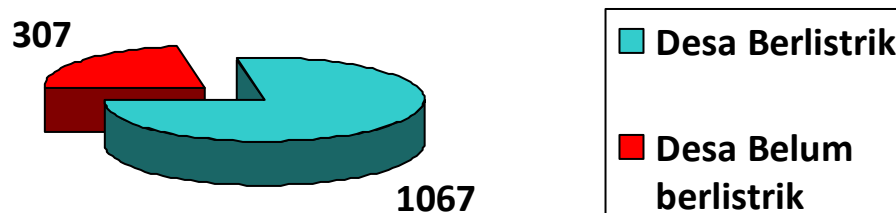
Sektor energi merupakan sektor vital pendukung pembangunan daerah, dengan semua keterbatasan yang ada, maka tidak semua desa di Provinsi Jambi dapat dialiri listrik PLN. Oleh karena itu, dalam rangka penyediaan energi khususnya pada desa-desa yang tidak terjangkau oleh aliran PT. PLN, hingga saat ini telah terbangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro beserta jaringannya dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Hal tersebut tentu saja berdampak pada peningkatan Rasio Elektrifikasi Desa di Provinsi Jambi yang mencapai 89,79 persen, meningkat sebesar 20,28 persen dari tahun 2011. Untuk melihat sejauhmana perkembangan jumlah pembangunan, penembangan, dan pemberdayaan energi dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Jumlah Desa yang Ter-aliri listrik PLN

Kabupaten/Kota <i>legency/Municipality</i>	Berlistrik <i>Electrical</i>	Belum Berlistrik <i>Unelectrical</i>	Jumlah <i>Total</i>	Persentase Desa Berlistrik <i>Percentage</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kerinci	200	9	209	95, 69
2. Merangin	127	85	212	59, 91
3. Sarolangun	102	29	131	77, 86
4. Batang Hari	92	21	113	81, 42
5. Muaro Jambi	132	23	155	85, 16
6. Tanjab Timur	52	41	93	55, 91
7. Tanjab Barat	30	40	70	42, 86
8. Tebo	87	20	107	81, 31
9. Bungo	115	38	153	75, 16
10. Kota Jambi	62	0	62	100,
11. Kota Sunai Penuh	68	1	69	98, 55
Jumlah/ Total 2011	1 067	307	1 374	77,66

Sumber : Jambi Dalam Angka Tahun 2011

Gambar 3.3. Capaian Desa Yang Ter-aliri Listrik





Dari berbagai upaya dalam kegiatan pengembangan energi yang telah dilakukan tersebut, saat ini telah terinventarisir dan tersedia data potensi desa yang mempunyai bahan nabati serta terbinannya masyarakat desa mandiri energi, terbangunnya biogas 14 digister dan 14 unit kompor, terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana energi sambungan listrik. Lebih lanjut mengenai rasio elektrifikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6.
Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Elektrifikasi Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Persentase Rasio Elektrifikasi	53.44	53.44	65	89,79	102

Sumber : Dinas ESDM, & Hasil pengolahan data tahun 2012

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat capain target rasio elektrifikasi pada tahun 2012 sebesar 89,79% telah melewati target RPJMD yakni sebesar 82%. Dampak positif dari peningkatan rasio elektrifikasi tersebut adalah semakin maju dan berkembangnya masyarakat yang mendapatkan informasi serta menjadikan masyarakat yang tersambung jaringan elektrifikasi menjadi lebih produktif dengan menumbuhkan industri-industri rumah tangga yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi industri kecil.

3.2.1.2.2. Indikator Kinerja Persentase Desa Yang Memakai Energi Baru Terbarukan

Dalam rangka memenuhi kecukupan energi di Provinsi Jambi, saat ini telah dibangun Kerinci Hydro Power oleh PT Bukaka Teknik Energy dengan kapasitas 350 MW di Batang Merangin Kabupaten Kerinci. Disamping itu, pada tahun 2012 telah diinvestasikan dana sebesar Rp. 47 milyar oleh PT Pertamina Geothermal Energy untuk eksploitasi dan uji sumur produksi, disamping itu masih terus dilakukan eksplorasi terhadap potensi geothermal di lokasi sekitarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga, telah dilaksanakan proyek Gas Kota (city gas) di Kota Jambi dalam rangka konversi minyak tanah ke gas untuk sambungan sebanyak 4.000 rumah tangga. Proyek city gas ini nantinya akan dikelola oleh operator, terutama BUMD.



Tabel 3.7.
Peningkatan Jumlah Pengembangan Energi Baru Terbarukan

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		Kondisi 2010	Kondisi 2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Jumlah PLTMH	9 unit	10 unit	1 unit	1 unit	100
2.	Jumlah PLTS	6.069 unit	6.069 unit	4 unit	4 unit	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat capaian jumlah pembangunan PLTMH telah tercapai sesuai dengan target yakni 1 unit PLTMH. Namun, untuk kegiatan pengadaan PLTS melalui Dana APBD sejak tahun 2009 sudah tidak ada lagi. Data terakhir menunjukkan bahwa total jumlah PLTS Tahun 2009 adalah sebanyak 6.069 unit, Tahun 2012, Provinsi Jambi mendapatkan 4 PLTS Komunal, dan 3 kms jtm, 14 digister 14 kompor gas, serta melakukan 9 kali pembinaan ke Kabupaten/Kota.

Jika dibandingkan dengan target sasaran dalam RPJMD Provinsi Jambi, seyogyanya di tahun 2012 ini total jumlah PLTMH berjumlah 12 unit, namun pada kenyataannya hanya mencapai 11 unit PLTMH dari target yang akan dicapai secara keseluruhan di tahun 2015 yakni sebanyak 19 PLTMH. Ini berarti pencapaian sasaran RPJMD baru menyentuh angka 57,8%. Berbagai survei, pembangunan/pengembangan, serta pembinaan telah dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber pembangkit listrik dari energi baru terbarukan di wilayah Provinsi Jambi.

Dalam rangka peningkatan dan pemanfaatan energi baru terbarukan, pemanfaatan Biogas juga semakin digalakkan di wilayah kota maupun pedesaan. Teknologi biogas merupakan teknologi tepat guna untuk mengolah limbah padat (tinja dan isi rumen) dan limbah cair (urine dan air pencucian kandang/ternak) yang dihasilkan dari usaha peternakan. Pengolahan yang dilakukan dapat mengurangi pencemaran lingkungan serta memanfaatkan limbah sebagai produk berdaya guna penghasil sumber energi berupa bahan bakar gas (gasbio) dan dapat pula menghasilkan pupuk organik padat dan cair yang bermutu bagi usaha pertanian. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan pembangunan 2 (dua) unit biogas yang berlokasi di UPTD Pembibitan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi dan di kelompok tani Teman Abadi Desa Kasang Pudak Kecamatan Pelayangan Kota Jambi.

Dengan dimanfaatkannya energi terbarukan ini, telah membawa Provinsi Jambi menjadi provinsi yang memiliki energi cadangan selain daripada elektrifikasi yang dilakukan oleh PLN. Dampak yang bisa dirasakan adalah pemerintah dapat



mengurangi subsidi bahan bakar minyak, banyak energi jadi lebih murah sehingga menghemat anggaran Pemerintah Daerah. Selain itu, penggunaan gas sebagai pembangkit listrik sangat responsif terhadap beban dan fleksibel dalam pegeroperasiannya sehingga dapat mendukung stabilitas jaringan.

Dengan demikian, selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tahun 2012 target kinerja peningkatan kualitas infrastruktur energi dan listrik mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat terwujud tentunya tidak terlepas dari program dan kegiatan yang terencana dengan baik dan disinkronkan dengan program "satu milyar satu kecamatan".

3.2.1.3. Sasaran Terciptanya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih

3.2.1.3.1. Indikator Kinerja Optimalisasi Jaringan Irigasi

Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan target terpeliharanya bendung, saluran pembawa dan pembuang serta bangunan pelengkap lainnya untuk memberikan jaminan pelayanan terhadap lahan irigasi seluas 6.029 ha (kewenangan Provinsi) pada wilayah-wilayah produksi utama di Provinsi Jambi. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak peningkatan produktivitas sektor pertanian dan kepada masyarakat luas secara umum. Oleh karena itu, pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya lebih diarahkan pada kegiatan rehabilitasi daerah irigasi, bendung dan operasional dan pemeliharaan Daerah Irigasi serta pengawasan pekerjaan.

Pelaksanaan kegiatan juga dilaksanakan pada beberapa kabupaten/kota terutama pada wilayah-wilayah potensi sumberdaya pertanian secara luas. Penanganan infrastruktur sumber daya air di Provinsi Jambi pada tahun 2012 lebih dititik beratkan pada program pembangunan turap/talud/bronjong; program pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; program penyediaan dan pengelolaan air baku; dan program pengendalian banjir.

Dalam program pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain perencanaan pembangunan jaringan irigasi; rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi; optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun; pembangunan jaringan irigasi; rehabilitasi/pemeliharaan jaringan rawa dan kegiatan pengelolaan sumber daya air.

Melalui program ini telah dilaksanakan Rehabilitasi Jaringan irigasi seluas 5.996 ha dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi seluas 4.773 ha dengan rincian sebagai berikut :



1. Rehabilitasi saluran primer sepanjang : 3553,4 meter,
2. Saluran sekunder sepanjang 2608 meter,
3. Rehabilitasi jalan inspeksi : 8.673 meter,
4. Rehabilitasi bangunan pelengkap sebanyak 8 bh,
5. Rehab bendung 1 buah,
6. Rehab lantai saluran 745 meter,
7. Rehabilitasi pintu air sebanyak 3 unit,
8. Rehabilitasi bronjong sepanjang 26 meter dan
9. Pemeliharaan jaringan irigasi yaitu saluran Primer sepanjang 49.812 meter dan saluran sekunder sepanjang 24.520 meter.

Daerah Irigasi (DI) yang direhab/dipelihara pada tahun 2012 meliputi DI. Suban Kab. Tanjab Barat, DI. Napal Sisik Desa Napal Sisik Kec. Muaro Bulian Kab. Batanghari, DI. Limun Singkut Kab. Sarolangun, Pembebasan Lahan DI. Batang Asai Kab. Sarolangun, DI. Batang Uleh Kab. Bungo, DI. Pagar Puding Kab. Tebo, DI. Sumur Anyir Kec. Sungai Penuh Kota Sungai Penuh, DI. Sei. Tarantam Besar Kec. Tanah Sepenggal Kab. Bungo, DI. Sei. Talang Cabuk Kec. Tanah Sepenggal Kab. Bungo, DI. Sei Air Lintah Kab. Kerinci, DI. Sei Air Jujun Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci, DI. Karneo Ds. Simpang Karneo Kec. Batin XXIV Kab. Batanghari, dan DI. Sei. Gunung Selasih Kab. Kerinci.

Tabel 3.8.
Perbandingan Capaian Kinerja Optimalisasi Jaringan Irigasi
Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Optimalisasi Jaringan Irigasi	3.727 Ha	3.727 Ha	3.727 Ha	5.996 Ha	160

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

Dengan optimalisasi pengelolaan dan rehabilitasi jaringan irigasi telah berdampak positif pada peningkatan produksi pertanian Provinsi Jambi tentunya disandingkan dengan program-program prioritas di bidang pertanian dan ketahanan pangan, pada tahun 2012 Provinsi Jambi mengalami peningkatan produksi padi sebesar 14.604 ton atau sebesar 2,26% jika dibandingkan tahun 2011, yaitu dari 646.640 ton GKG menjadi 661.244 ton GKG pada tahun 2012 (ARAM II 2012). Kenaikan produksi padi ini terjadi karena adanya peningkatan produktivitas sebesar 0,46 Kw/Ha (1,11%), serta didukung oleh peningkatan luas panen sebesar 1.790 Ha (1,14%).



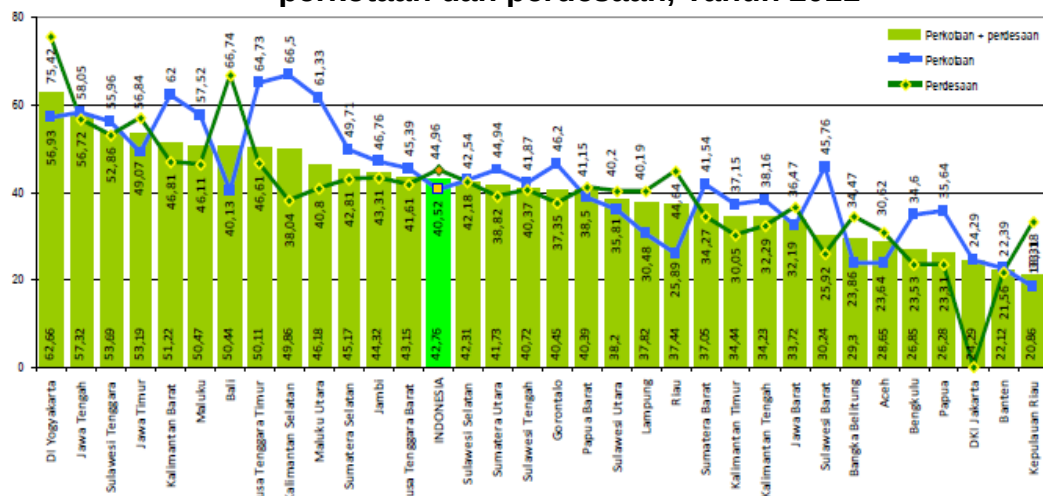
3.2.1.3.2. Indikator Kinerja Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan, Pedesaan, dan Perkotaan+Pedesaan (Target MDGs)

Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mana diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat dan taraf kesehatan masyarakat, dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Penyediaan air minum atau air bersih yang layak bagi masyarakat sampai saat ini masih menjadi salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini didasarkan pada kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa aksesibilitas masyarakat (baik di perkotaan maupun perdesaan) terhadap air bersih dan air minum masih relatif rendah. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jambi secara konsisten dan berkesinambungan terus mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan penyediaan air bersih dan air minum ini.

Pada tahun 2012 program-program keciptakaryaan yang mendukung capaian indikator kinerja ini antara lain : program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong; program pemberdayaan komunitas perumahan; program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya serta program pembangunan infrastruktur perdesaan. Secara keseluruhan program – program tersebut bertujuan untuk pencapaian target *Millenium Development Goals (MDG's)*.

Grafik 3.1.
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan, perdesaan, serta perkotaan dan perdesaan, Tahun 2011



Sumber : Laporan Pencapaian MDGs Tahun 2011



Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum yang layak antarprovinsi pada tahun 2011 memiliki disparitas dari 20,86 sampai 2,66 persen. Sebanyak 13 dari 33 provinsi memiliki proporsi di atas rata-rata nasional dan provinsi dengan proporsi tertinggi adalah DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tenggara, sedangkan provinsi dengan proporsi terendah adalah Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, dan Papua.

Jika dilihat dari grafik 3.1. di atas, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan, pedesaan, serta perkotaan+pedesaan Provinsi Jambi menunjukkan angka 44,32%. Hal ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2009 yakni sebesar 51,19%.

Tabel 3.9.
Perbandingan Capaian Kinerja Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan, Pedesaan, serta Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Persentase Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan	51,19	44,32	44,32	44,32	100

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

Melalui kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi telah melaksanakan 11 paket pekerjaan pengadaan pipa PVC (pipa distribusi) dan sambungan rumah untuk air bersih/air minum yang meliputi wilayah Kabupaten Bungo, Muaro Jambi, Sarolangun, Batanghari, Merangin, Kerinci, Tanjabbar, dan Tanjab Timur. Grafik berikut memperlihatkan sambungan rumah untuk air minum yang dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2012.



Grafik 3.2.
Sambungan Rumah Untuk Air Minum Pada Tahun 2011 dan 2012.



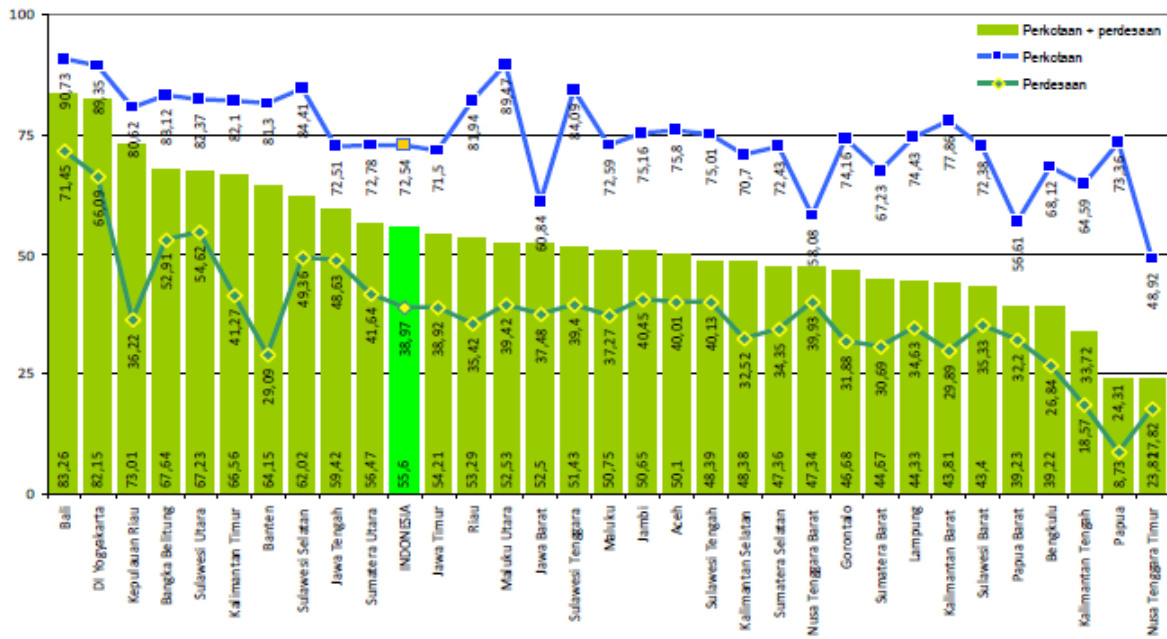
Dengan adanya akses berkelanjutan terhadap sambungan air minum layak ini, secara tidak langsung mengubah pola hidup masyarakat Provinsi Jambi dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan sebagai dasar menuju kualitas hidup yang lebih baik. Salah satu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat adalah melalui pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini merupakan komponen fisik sarana dan prasarana air minum.

3.2.1.3.3. Indikator Kinerja Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Dasar Layak, Perkotaan, Pedesaan, Perkotaan dan Pedesaan (Target MDGs)

Akses rumah tangga terhadap fasilitas sanitasi dasar layak secara nasional terus meningkat, tapi secara umum masih terdapat variasi antar provinsi. Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi dasar layak beragam dari 22,97 persen hingga 84,57 persen, dengan rata-rata nasional 55,60 persen pada tahun 2011. Peningkatan terjadi jauh lebih tinggi di pedesaan dibandingkan perkotaan. Pada tahun 2011, proporsi rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dasar layak meningkat dari 53,64 persen pada tahun 2009 menjadi 72,54 persen, sedangkan di pedesaan meningkat dari 11,10 persen pada tahun 2009 menjadi 38,97 persen. Pada grafik 3.3., terlihat sebanyak 10 dari 33 provinsi memiliki proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi dasar layak di atas rerata nasional dan provinsi dengan proporsi tertinggi adalah Bali, DI Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. Sedangkan provinsi dengan proporsi terendah adalah Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Kalimantan Tengah.



Grafik 3.3.
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Dasar Layak, Perkotaan, Pedesaan, Perkotaan dan Pedesaan (Target MDGs)



Sumber : Laporan MDG's Tahun 2011

Jika dilihat pada grafik tersebut, Provinsi Jambi mencapai skor proporsi rumah tangga sanitasi dasar layak sebesar 50,65%. Hal ini dapat terwujud melalui program kegiatan yang telah direncanakan dengan baik, diantaranya oleh Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pada tahun 2011 telah dilaksanakan pada 70 desa, sedangkan untuk tahun 2012 ditargetkan terjadi peningkatan sebanyak 20 desa dan telah terealisasi sebanyak 20 desa, Kumulatif sampai dengan tahun 2012 menjadi 90 desa. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Community Water Services and Health Project (CWSHP) di 5 Kabupaten yaitu Muaro Jambi, Batang Hari, Bungo, Sarolangun, dan Tanjab. Barat. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ini telah berdampak pada perubahan perilaku bersih sehat. Sebagai indikator pencapaian STBM, salah satunya adalah adanya deklarasi masyarakat desa bebas buang air besar sembarangan (Open Defecation Free/ODF).

Untuk target pada indikator ini, telah ditetapkan persentase capaian indikator kinerja sesuai dengan target MDGs. Lebih lanjut mengenai perbandingan capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.10.
Perbandingan Capaian Kinerja Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Dasar Layak, Perkotaan, Pedesaan, serta Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Persentase Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Dasar Layak, Perkotaan dan Pedesaan	40,93	50,65	50,65	50,65	100

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

Analisis capaian kinerja tersebut di atas tidak terlepas dari keberhasilan pencapaian pelaksanaan desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat tahun 2012 telah tercapai sesuai target, dengan capaian 100%, yakni dalam bentuk :

1. Pelaksanaan STBM dilakukan secara intensif melalui proyek CWSH yang terencana, terkoordinasi secara lebih baik.
2. Pembiayaan yang berbasis masyarakat dan dukungan pembiayaan oleh ADB sesuai kebutuhan.
3. Adanya community fasilitator (desa)
4. Adanya dukungan pemerintah daerah (Bupati) secara intensif.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dilakukan Sosialisasi kebijakan kesehatan lingkungan (pendampingan ADB) dan Kegiatan upaya penyehatan tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan dan kesehatan tempat kerja.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar layak, perkotaan, pedesaan, perkotaan dan pedesaan yang merupakan target MDGs, juga dilakukan upaya lainnya yakni Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan Sehat. Kab/Kota/Kawasan Sehat merupakan suatu program/kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi aman, nyaman, bersih dan sehat secara terkoordinasi lintas program/lintas sektoral melalui 9 pilihan tatanan yang telah ditetapkan yaitu kawasan permukiman sehat, kawasan industri dan perkantoran sehat, kawasan pariwisata sehat, kawasan pertambangan sehat, kawasan kehutanan yang sehat, prasarana umum perkotaan yang sehat, budaya dan



perilaku hidup bersih dan sehat, kehidupan sosial yang sehat dan ketersediaan pangan dan gizi.

Di Provinsi Jambi kegiatan ini telah disosialisasikan sejak tahun 2005 kesemua Kab/Kota, dan pada tahun 2007 juga telah terbentuk Tim Pembina Kab/Kota sehat dengan surat keputusan No. 184/Kep.Gub/Dinkes/2007 serta No. 29 tahun 2008. Untuk mendukung indikator sasaran Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan Sehat dilakukan beberapa kegiatan yaitu : kegiatan monitoring kualitas lingkungan (udara), kegiatan pemberdayaan desa lingkungan bersih dan sehat. Pada tahun 2012 ini untuk Kab/Kota/Kawasan Sehat mencapai 27,27%. Sebagai tindak lanjut dari dibentuknya Tim tersebut, saat ini telah dibentuk forum Kab/Kota Sehat terdiri dari Kab. Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan Kota Jambi.

3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya

Tabel 3.11
Pengukuran Kinerja Misi 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya

No.	Sasaran	Indikator	Kondisi awal RPJMD	Target Tahun 2012	Realisasi Tahun 2012	% Capaian
1.	Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas	Angka partisipasi murni (APM) :				
		- SD (%)	- 99	- 99,90	- 99,90	100
		- SMP (%)	- 65	- 98,15	- 98,15	100
		- SMA (%)	- 65,90	- 67,09	- 67,09	100
		Persentase angka melek huruf	- 50,9	- 6,1	- 6,1	100
		Angka rata-rata lama sekolah	- 7,8 Th	- 8 Th	- 8,04 Th	100
		Beasiswa "SAMISAKE" bagi keluarga tidak mampu :				
		- S1,	- 100	- 1500	- 1910	127
		- S2,	- 100	- 350	- 427	122
		- S3	- 5	- 100	- 138	138
2.	Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan	Rasio antara jumlah murid SMA dan SMK	- 60 : 30	- 65 : 35	- 65 : 35	100
		Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan	- 121.524	- 13.000 Orang	- 13.246 Orang (total 145.707)	101
		Jumlah kepesertaan masyarakat yang mendapat jaminan sosial Jamkesmasda Prov. Jambi (SAMISAKE)	- 5.250 Orang	- 7.252 Orang	- 34.133 Orang	470
		Prevalensi kekurangan	- 92	- 93,00	- 93,52	100



		gizi pada balita				
		– Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	– 85	– 89	– 85,79	96,40
		– Persentase rumah sakit pemerintah yang terakreditasi	– 50	– 60	– 66,6	110
		– Persentase puskesmas yang berkinerja baik	– 50	– 60	– 63	105
3.	Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial	– Persentase menurunnya rumah tangga sangat miskin	– 7,5	– 8	– 8,28	103

3.2.2.1. Sasaran Terwujudnya Pemerataan Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas

3.2.2.1.1. Indikator Kinerja Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, SMA.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan motivasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan meningkatkan akses pelayanan pendidikan dasar serta meningkatkan sarana dan prasarana belajar dalam rangka pemenuhan kebutuhan bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah melaksanakan program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan pendidikan masyarakat.

Melalui Program Pendidikan Dasar 9 Tahun bertujuan untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang bermutu dan mengurangi angka putus sekolah, dan disamping itu program ini juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia. Penyelenggaraan Program Pendidikan sebagian berupa pembangunan infrastruktur pendukung penyelenggaraan pendidikan, Kesetaraan Paket A dan B, memberikan pelatihan Paket Aplikasi sekolah, peningkatan mutu kompetensi Guru melalui Lesson studi, pembrantasan Buta Aksara Alqur'an, pendampingan Pengelolaan Dana BOS Provinsi dan sebagainya.

Secara umum, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar lebih kepada unsur motivasi peserta didik maupun kesungguhan orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya serta pihak pengelola pendidikan dalam proses pembelajaran yang bermutu di satuan pendidikan, sehingga apa yang diperoleh dalam proses pendidikan bermanfaat bagi kehidupan peserta didik. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jambi secara bertahap mengalokasikan pembiayaan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Pendidik, sehingga diharapkan permasalahan penyelenggaraan pendidikan yang disebabkan oleh masih terdapatnya Guru yang



belum berkualifikasi Strata 1 sebagaimana harusnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Guru dan Dosen dapat terpenuhi.

Tabel 3.12
Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Jenjang
Pendidikan Dasar Tahun 2012

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah SD		Jumlah SMP	
		Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa
1	Kota Jambi	209	59.815	60	22.562
2	Kota Sungai Penuh	71	9.890	12	4.347
3	Kab. Batanghari	208	30.871	50	6.935
4	Kab. Bungo	229	40.495	59	12.205
5	Kab. Kerinci	228	25.629	55	7.923
6	Kab. Tanjab Barat	203	36.101	58	5.164
7	Kab Merangin	307	30.449	89	6.675
8	Kab. Sarolangun	185	29.287	60	7.035
9	Kab. Tebo	234	37.522	56	12.185
10	Kab. Muaro Jambi	236	34.142	73	10.503
11	Kab. Tanjab Timur	205	20.063	46	5.973
JUMLAH		2.315	354.264	618	101.507

Implementasi dari program ini telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB 99,80% tahun 2011 menjadi 99,90% pada tahun 2012. Untuk tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ SMPLB juga mengalami peningkatan 97,72 % tahun 2011 menjadi 98,15% pada tahun 2012.

Tabel 3.13.
Perbandingan Capaian Kinerja Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar
Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Persentase Angka Partisipasi Murni Pendidikan dasar	99,70	99,80	99,90	99,90	100

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

Pada Program Pendidikan Sekolah Menengah, diarahkan dalam rangka perluasan akses layanan dan meningkatkan mutu keluaran/lulusan melalui



berbagai upaya antara lain pemberian bantuan operasional, penyediaan ruang kelas, peningkatan bakat dan prestasi siswa, baik umum (SMA) maupun kejuruan (SMK).

Upaya peningkatan akses pendidikan, terutama bagi siswa miskin dari sisi ekonomi sangat ditentukan oleh kebijakan yang dirumuskan dengan baik dan dibangun dengan proses partisipatif. Dalam upaya tersebut pemerintah menganut kebijakan yang berpihak pada siswa miskin. Kebijakan yang berpihak kepada siswa miskin bertujuan untuk mengupayakan siswa miskin menikmati layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah tanpa terancam putus sekolah. Pada tahun 2012 telah dicanangkan kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU) oleh Mendikbud RI untuk memperluas kesempatan dan jangkauan partisipasi semua golongan untuk memperoleh layanan pendidikan.

Penyelenggaraan Program Pendidikan Menengah di Provinsi Jambi juga ditempuh dengan meningkatkan sarana dan prasarana belajar dalam rangka pemenuhan kebutuhan bidang pendidikan. Pembangunan infrastruktur beserta alat penunjang belajar serta beberapa kegiatan pembinaan anak didik seperti pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA, penyelenggaraan Paket C, kegiatan pembinaan peserta FLSSN, SMA, kegiatan lomba seni Nasional, lawatan sejarah, kegiatan Pembangunan Bisnis center.

Dari upaya-upaya yang sudah dilakukan tersebut berdampak terhadap target capaian indikator kinerja bidang pendidikan pada RPJMD antara lain Angka Partisipasi murni pada Jenjang jenjang SD 99,90%, SMP yaitu 98,15% dan jenjang pendidikan menengah SMA/SMK 67,09%.

Tabel 3.14.
Perbandingan Capaian Kinerja APM Pendidikan Menengah (SMA)
Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Persentase APM pendidikan menengah (SMA)	65,90	66,00	67,09	67,09	100

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

3.2.2.1.2. Indikator Kinerja Persentase Angka Melek Huruf (Pengentasan Angka Buta Aksara)

Dalam rangka meningkatkan angka melek huruf Provinsi Jambi, tentunya sangat berkaitan erat dengan pengentasan buta aksara. Angka buta huruf/aksara di Provinsi Jambi yang saat ini berjumlah 80.641 orang. Disamping buta huruf



latin, Pemerintah Provinsi Jambi juga akan menuntaskan angka buta huruf Al Qur'an yang saat ini masih cukup besar yaitu 25.709 orang.

Tabel 3.15.
Target Pengentasan Buta Aksara Provinsi Jambi

Jumlah Penduduk Buta Aksara Usia 15-59Th ke atas (Sensusnas) 80.641 Orang	TARGET TAHUN					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	4.910 (9,9%)	7.500 (15,2%)	3.050 (6,1%)	12.800 (26,0%)	10.481 (21,2%)	10.477 (21,28%)

Untuk itu, melalui APBD 2012 telah dianggarkan untuk penuntasan buta aksara Al- Qur'an. Selanjutnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi sebesar 8 tahun sudah mendekati target yang telah ditetapkan oleh RPJMN pada tahun 2014 sebesar 8,04 tahun. Akan tetapi, Pemerintah Pusat sejak tahun 2012 telah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, sehingga Pemerintah Provinsi Jambi harus bekerja keras untuk mencapainya. Dalam kaitan pencapaian target tersebut diatas, pemerintah Provinsi Jambi tetap mendorong Kabupaten/Kota untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan. Disamping itu, Pemerintah Provinsi tetap berkomitmen meningkatkan infrastruktur pendidikan sesuai dengan kewenangan, salah satunya melalui dana transfer ke daerah.

Tabel 3.16.
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Angka Melek Huruf (Pengentasan Buta Aksara) Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Persentase Angka Melek Huruf (pengentasan buta aksara)	5,9	6,0	6,1	6,1	100

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

3.2.2.1.3. Indikator Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Melalui Program Pendidikan Dasar 9 Tahun bertujuan untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang bermutu dan mengurangi angka putus sekolah, sangat berpengaruh pada Angka Rata-Rata Lama Sekolah. Saat ini angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jambi sebesar 8,04 tahun, dan sudah



mencapai target yang telah ditetapkan oleh RPJMN pada tahun 2014 sebesar 8,04 tahun. Akan tetapi, Pemerintah Pusat sejak tahun 2012 telah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, sehingga Pemerintah Provinsi Jambi harus bekerja keras untuk mencapainya. Dalam kaitan pencapaian target tersebut diatas, pemerintah Provinsi Jambi tetap mendorong Kabupaten/Kota untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan. Disamping itu, Pemerintah Provinsi tetap berkomitmen meningkatkan infrastruktur pendidikan sesuai dengan kewenangan, salah satunya melalui dana transfer ke daerah.

Melalui indikator peningkatan angka rata-rata lama sekolah selama 2 (dua) tahun terakhir juga mengalami peningkatan dari 7,8Th pada tahun 2010 menjadi 7,9Th pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan angka rata-rata lama sekolah menjadi 8,04Th. Gambaran perbandingan capaian kinerja angka rata-rata lama sekolah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Tabel 3.17.
Perbandingan Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Angka rata-rata lama sekolah	7,8 Th	7,9 Th	8 Th	8,04	100

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

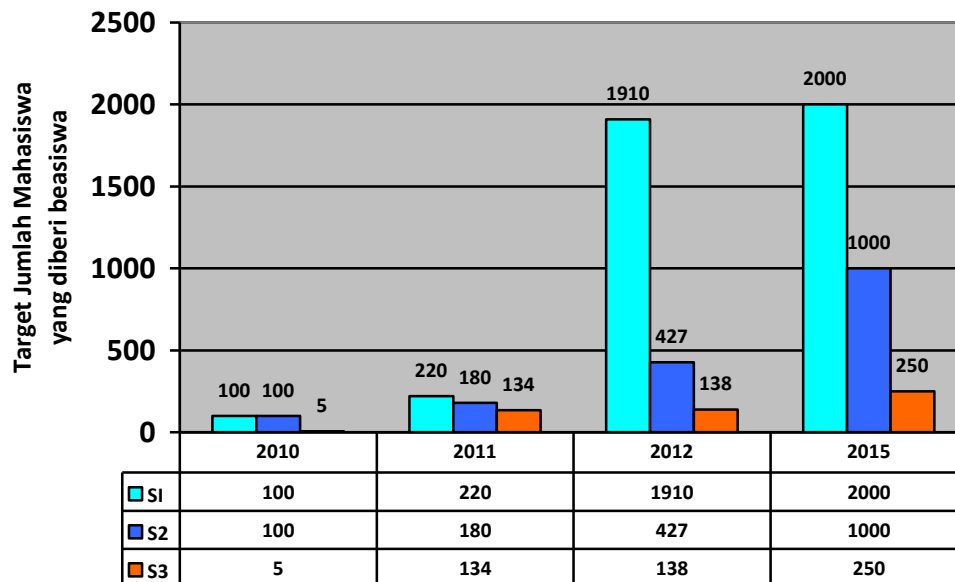
3.2.2.1.4. Indikator Kinerja Pemberian Beasiswa Bagi Keluarga Kurang Mampu

Capaian kinerja yang mendapat apresiasi cukup baik oleh masyarakat Provinsi Jambi adalah pemberian beasiswa SAMISAKE. Beasiswa diberikan bagi masyarakat kurang mampu, mahasiswa berprestasi, dan mahasiswa dengan program studi pilihan. Hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya bantuan beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi kepada mahasiswa dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 tercatat bantuan yang telah diberikan yakni, S1 : 100 orang, S2 : 100 orang, dan S3 : 5 Orang.

Peningkatan pemberian bantuan beasiswa terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah S1 : 220 Orang, S2 : 180, dan S3 : 134. Sedangkan pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yakni pemberian beasiswa bagi S1 sebanyak : 1910 Orang, S2 sebanyak : 427 Orang, dan S3 sebanyak : 138 Orang. Untuk melihat perkembangan pemberian beasiswa tersebut dapat dilihat pada diagram berikut ini :



Diagram 3.2.
Peningkatan Pemberian Bantuan Beasiswa



Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

Secara rinci mengenai pemberian beasiswa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.18.
Rincian Pemberian Bantuan Beasiswa

NO.	JENIS BANTUAN	JUMLAH PENERIMA LOLOS SELEKSI	JUMLAH PENERIMA YANG DI BAYARKAN	JUMLAH PENERIMA YANG TIDAK DIBAYARKAN	ALASAN
1	2	3	4	5	6
1.	BEASISWA STRATA 3 (S3)	138 Orang	121 Orang	17 Orang	Penerima bantuan dikti aktif telah selesai studi
2.	BEASISWA STRATA 2 (S2)	427 Orang	411 Orang	16 Orang	
3.	BEASISWA STRATA 1 (S1)	1910 Orang	1852 Orang	58 Orang	
4.	BEASISWA STRATA 3 (S3) LANJUTA TAHUN 2011	26 Orang	21 Orang	5 Orang	Penerima Bantuan Studi Beasiswa Dikti
5.	BEASISWA STRATA 2 (S2) LANJUTA TAHUN 2011	95 Orang	58 Orang	37 Orang	
6.	BEASISWA STRATA 1 (S1) Program Jalur SNMPTN	7 orang	7 orang		Telah Selesai Studi dan Penerima Bantuan Dikti Aktif
7.	BEASISWA STRATA 1 (S1) Program Jalur Kemitraan ITB	13 orang	7 orang		



8.	BEASISWA STRATA 1 (S1) Program Jalur Khusus Teknik Pertambangan	64 orang	64 orang		
9.	BEASISWA STRATA 2 (S2) BAGI GURU SMP/SMA/SMK JALUR FMIPA UI TAHUN 2011	35 Orang	35 Orang		
10.	BEASISWA STRATA 2 (S2) BAGI GURU SMP/SMA/SMK JALUR FMIPA UI TAHUN 2010	24 Orang	24 Orang		

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2010 s.d. 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.19.
Perbandingan Capaian Kinerja Pemberian Beasiswa SAMISAKE
Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	S1	100	220	1500	1910	127
	S2	100	180	350	427	122
	S3	5	134	100	138	138

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

Dengan diberikannya bantuan beasiswa tersebut, saat ini telah memberikan dampak yang positif bagi pembangunan provinsi Jambi. Sebagian besar alumni yang diberikan beasiswa tersebut telah memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dengan menjadi dosen, berkiprah di pemerintahan yang berdampak pada profesionalitas kinerja aparatur. Bahkan ada beberapa alumni yang menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan maupun di perusahaan swasta.

3.2.2.1.5. Indikator Kinerja Rasio Antara SMA dan SMK

Dalam rangka meningkatkan rasio antara SMK dan SMA sebesar 70 berbanding 30 pada tahun 2015, seperti yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2015, Pemerintah Provinsi Jambi telah mendorong pembangunan gedung sekolah baru SMK yang didasarkan pada keunggulan lokal di masing-masing kabupaten/kota. Pada tahun 2012, Rasio SMA dan SMK telah mencapai 65 : 35. Jika dibandingkan dengan target tahun 2015, capaian rasio SMK telah melebihi target yakni sebesar 35%. Untuk tahun 2013, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengalokasikan anggaran pembangunan USB SMK sebanyak 4 unit di 4 kabupaten dan melakukan relokasi 1 unit SMK di Kota Jambi. Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasio yang berdampak pada peningkatan lulusan SMK yang memiliki kompetensi sehingga mampu bersaing di pasar kerja.



Tabel 3.20.
Perbandingan Capaian Kinerja Rasio SMA dan SMK Tahun 2010 s.d. 2012

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah SMA		Jumlah SMK	
		Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa
1	Kota Jambi	33	15.554	39	7.072
2	Kota Sungai Penuh	9	3.489	5	908
3	Kab. Batanghari	13	5.522	6	502
4	Kab. Bungo	18	6.518	15	759
5	Kab. Kerinci	13	5.021	6	347
6	Kab. Tanjab Barat	24	4.892	9	140
7	Kab Merangin	20	6.158	13	225
8	Kab. Sarolangun	18	4.227	24	1.211
9	Kab. Tebo	19	5.509	11	2.843
10	Kab. Muaro Jambi	18	5.951	10	792
11	Kab. Tanjab Timur	12	3.640	7	462
JUMLAH		173	66.481	139	15.261

Tabel 3.21.
Perbandingan Capaian Kinerja Rasio SMA dan SMK
Provinsi Jambi Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Rasio SMA dan SMK	60 : 30	60 : 30	65 : 35	65 : 35	100

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

3.2.2.1.5. Indikator Kinerja Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Provinsi Jambi, maka dilaksanakan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, peningkatan koleksi bahan pustaka yang variatif, peningkatan pelayanan perpustakaan keliling, meningkatkan minat baca dan budaya baca masyarakat Jambi yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan, serta melestarikan informasi tentang kebudayaan daerah Jambi sebagai bagian dari kebudayaan nasional agar dapat selalu ada dan dapat diketahui dan bermanfaat bagi generasi berikutnya.

Untuk mendukung program tersebut, telah dilakukan upaya strategis, diantaranya :

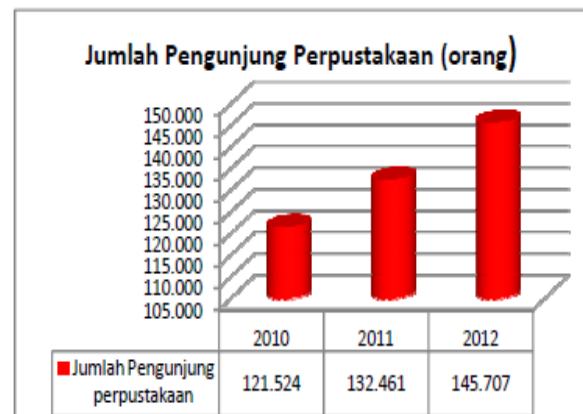


1. Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar,
2. Pengembangan Minat Baca dan Pengkajian Budaya Baca,
3. Pengembangan Koleksi Deposit dan Pelestarian Karya Cetak/Karya Rekam Khazanah Budaya Rakyat Jambi,
4. Pengembangan, Pengolahan Sistem Otomasi dan Koleksi Bahan Perpustakaan,
5. Evaluasi, Pelaporan Pendataan Anggota Perpustakaan NPP,
6. Bintek Tenaga Pengelola Kearsipan, dan
7. Pemeliharaan Pelestarian Bahan Pustaka dan Arsip.

Capaian dari program ini adalah meningkatnya jumlah anggota perpustakaan dari 8.951 orang di tahun 2011 menjadi 12.084 orang pada tahun 2012, demikian juga dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang meningkat menjadi **145.707** orang pada tahun 2012 dari 132.461 orang pada tahun 2011.

Meningkatnya jumlah pengunjung serta terwujudnya perpustakaan keliling dan sirkulasi layanan bahan Perpustakaan hingga pelayanan kepada Pemustaka semata-mata tidak terlepas dari kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Meningkatnya budaya baca dikalangan masyarakat berdampak positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran gerakan masyarakat gemar membaca.

Grafik 3.4. Jumlah Pengunjung Perpustakaan



Sumber : BPAD Provinsi Jambi

3.2.2.2. Sasaran Terwujudnya Pemerataan Akses Layanan Kesehatan

3.2.2.2.1. Indikator Kinerja Jumlah Kepesertaan Masyarakat yang Mendapat Jaminan Sosial Jamkesmasda Provinsi Jambi (SAMISAKE)

Untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien di Provinsi Jambi diupayakan juga melalui pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Daerah Provinsi Jambi melalui dana APBD Provinsi. Program ini dilakukan melalui program “Satu Millar Satu Kecamatan (SAMISAKE)”. Pada tahun 2012 sasaran kepesertaannya adalah masyarakat miskin dan tidak mampu telah diterbitkan Kartu Kepesertaan Jamkesmas Provinsi Jambi sebanyak 34.133 orang.



Berdasarkan ketetapan Menteri Kesehatan RI jumlah masyarakat di Provinsi Jambi yang menjadi kuota penjaminan melalui Jamkesmas sebesar 784.842 jiwa, sementara masyarakat miskin dan tidak mampu diluar kuota tersebut masih ditanggung pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota. Dengan dasar tersebut Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota menyelenggarakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESDA).

Tabel 3.22.
Capaian Kinerja Kepersertaan Masyarakat
Yang Mendapat Jaminan Kesehatan (Jamkesmasprov/da) Tahun 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Kepesertaan masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan jamkesmasda Prov. Jambi (SAMISAKE).	7.252 Orang	34.133 Orang	470

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target kinerja kepesertaan masyarakat yang mendapat jaminan sosial Jamkesmasprov (SAMISAKE) direncanakan 7.252 orang terealisasi sebesar 34.133 orang. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja yang diperoleh khususnya bidang kesehatan dapat dikategorikan "sangat baik".

Pelaksanaan pemberian Jamkesmasprov/da Samisake pada tahun 2011 telah diujicobakan pada 50 (lima puluh) kecamatan dan pada tahun 2012 diujicobakan lagi di 81 (delapan puluh satu) kecamatan lainnya. Akan tetapi di bidang kesehatan memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat sangat miskin di 131 kecamatan yang ada di Provinsi Jambi.

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung meningkatkan Jaminan Pembiayaan Pemeliharaan Kesehatan seluruh masyarakat antara lain :

- a. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Jamkesmas) Provinsi : Kegiatan pengembangan kemitraan Sosial dalam penanggulangan kemiskinan,
- b. Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) : Kegiatan Samisake

Masyarakat miskin yang telah terjamin oleh Jamkesmas sebanyak 784.842 jiwa sementara jumlah masyarakat miskin yang ada di Provinsi Jambi 849.016 jiwa maka masih terdapat 64.174 jiwa masyarakat miskin yang belum terjamin,



untuk itu dengan adanya program samisake diupayakan secara bertahap sampai tahun 2014 nanti semua masyarakat miskin sudah memiliki jaminan kesehatan secara menyeluruh sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Terkait dengan diberikannya Jamkesmasda Provinsi Jambi, tentunya tidak terlepas dari kesiapan tenaga medis serta sarana prasarana penunjang kesehatan yang ada. Oleh sebab itu, dalam rangka peningkatan pelayanan dan perawatan, beberapa kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan perawatan pasien RSUD Raden Mattaher. Dengan kapasitas 321 tempat tidur yang didukung sebanyak 1126 orang tenaga medis terdiri dari 908 tenaga medis PNS, 7 tenaga PTT-PTT BSB, 162 orang tenaga kontrak, 42 orang Tenaga honorer dan 2 orang TKS serta 5 orang tenaga part-time, yang melaksanakan pelayanan di RSUD Raden Mattaher Jambi yaitu :

1. Pelayanan rawat jalan mencakup poliklinik spesialis antara lain poliklinik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, penyakit anak, bedah (bedah orthopedi, saraf, digestive, bedah tumor), telinga hidung tenggorokan, penyakit mata, penyakit saraf, penyakit jantung, penyakit paru, penyakit kulit dan kelamin, penyakit gigi dan mulut (bedah mulut), penyakit jiwa, konsultasi gizi, pemeriksaan kesehatan.
2. Poliklinik umum dan poliklinik lain sesuai perkembangan (VCT/Voluntari Conseling dan Testing).
3. Pelayanan rawat inap terdiri dari perawatan terpadu (paviliun Khusus, Nurdin Hamzah, Gapkindo, Teratai, Jamsostek), perawatan penyakit Dalam, Kebidanan dan penyakit kandungan, perawatan anak, perinatologi, bedah dan bedah tulang, telinga hidung tenggorokan, penyakit mata, saraf, jantung, penyakit paru.
4. Pelayanan penunjang medik mencakup radiologi (CT-Scan, Rontgen, USG, Panoramic, dll), patologi klinik (laboratorium khusus), patologi anatomi (Laboratorium anatomi), farmasi. Pelayanan penunjang diagnostic mencakup pelayanan operasi (Instalasi Bedah Sentral, OK Emergency), rawat darurat, ICU/ICCU, Hemodialisa, Cardiopulmonary, Endoscopy, Treadmill. Pelayanan medic lainnya antara lain medical chek up, rehabilitasi medic (fisioterapi), pemulasaran jenazah, konsultasi HIV serta pelayanan non medis antara lain gizi, sterilisasi, laundry dan incenerator.

Dari sisi kesiapan prasarana, pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi melalui RSUD Rd. Matther Jambi mendapat bantuan Penggunaan dana Tugas Pembantuan (TP) dari APBN dan dilaksanakan untuk program bina upaya kesehatan yang pelaksanaannya untuk kegiatan pembangunan gedung dan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB. Adapun pembangunan yang dilaksanakan antara lain : Pembangunan gedung operasi, Pembangunan gedung



ICU, Pembangunan gedung perawatan kelas III. Sedangkan untuk pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB antara lain : Mesin Anestesi (2 unit) f ECG (3 unit) Lampu operasi (2 unit) g.Bed Side Monitor (5 unit), EMG (1unit) h. Ventilator (5 unit), Laparoscopy (1 unit) i. ICCU Bed (24 Unit), USG (1 unit) j. Tempat tidur kelas III (240 unit).

Tabel 3.23.
Indikator RSUD Raden Mattaher Jambi
Tahun 2008 s/d 2012

NO.	INDIKATOR	2008	2009	2010	2011	2012	KET
1.	Kunjungan Rawat Jalan	150.350	142.703	158.189	119.597	111.169	Kunjungan
2.	Rawat Inap	16.855	17.066	15.004	16.835	17.726	Orang
3.	B.O.R	81,70	76,25	72,70	82,7	78,5	%
4.	B.T.O	54,90	53,16	48,20	52,40	55,2	Kali
5.	L.O.S	4,30	4,23	4,5	4,7	5	Hari
6.	T.O.I	1,20	1,63	2,1	1,2	1,4	Hari
7.	G.D.R	5,20	4,92	6,34	5,98	5,83	%
8.	N.D.R	2,30	2,57	3	3,14	3,11	%
9.	Kunjungan IGD	15,345	18.130	16.143	24.039	24.835	Kunjungan
10.	Operasi Besar	1,637	1.774	1.827	2.200	2.368	Kali
11.	Operasi Sedang	458	654	732	748	710	Kali
12.	Operasi Kecil	4,158	5.341	6,415	9.002	6.067	Kali
13.	Penderita Keluar Hidup	15.981	16,225	14,052	15.811	16.692	Orang
14.	Penderita Keluar Mati < 48 Jam	394	402	494	483	482	Orang
15.	Penderita Keluar Mati > 48 Jam	498	439	458	541	552	Orang
16.	Jumlah TT Tersedia	307	321	315	321	321	TT

Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher. 2012

Dari tabel di atas terlihat perbandingan indikator pelayanan pasien di RSUD Raden Mattaher antara tahun 2011 dengan tahun 2012 antara lain, Bed Occupation Rate (BOR) pada tahun 2011 sebesar 82,70 % menurun menjadi 78,5 % tahun 2012. Bed Turn Over (BTO) pada tahun 2011 sebesar 52,40 meningkat menjadi 55,2 kali pada tahun 2012, Legh of Stay (LOS) pada tahun 2011 selama 4,7 hari menjadi 5 hari pada tahun 2012, hal ini diakibatkan oleh jumlah pasien yang berpenyakit kronis dan pasien ulangan sehingga hari rawat menjadi lebih panjang.

Turn Over Interval (TOI) dari 1,2 hari pada tahun 2011 menjadi 1,4 hari pada tahun 2012, menggambarkan padatnya hunian tempat tidur di RSUD Raden Mattaher. Gross Det Rate (GDR) 5,98 % pada tahun 2011 menjadi 5,83% pada tahun 2012 dan Net Det Rate (NDR) 3,14 % pada tahun 2011 menjadi 3,11 % pada tahun 2012. GDR menurun menandakan semakin membaiknya pelayanan pada rawat inap, namun NDR semakin banyak



diakibatkan karena banyaknya pasien yang masuk ke RSUD Raden Mattaher sudah rujukan dari rumah sakit dan pelayanan lainnya.

Di samping itu indikator lainnya yang dapat di uraikan adalah jumlah kunjungan rawat jalan, menurun dari 119.597 kunjungan pada 2011 menjadi 111.169 pada tahun 2012. Berbagai hal yang mengakibatkan turunnya kunjungan rawat jalan antara lain, berfungsinya sistem rujukan yang diterapkan oleh PT Askes yaitu pelayanan dasar dilayani di Puskesmas dan Rumah Sakit sebelum di rujuk ke RSUD Raden Mattaher.

Khusus pelayanan Jamkesmas dan Jamkesmasda dari bulan ke bulan selama tahun 2012 meningkat secara drastis, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.24
Kunjungan Rawat Jalan RSUD Raden Mattaher Jambi
Tahun 2012

Bulan	Total Pelayanan	Askes	Umum	Jamkesmas	Jamkesda	Astek	Gratis
Januari	31.221	5768	2862	1105	799	368	2
Februari	14.539	5134	2268	862	884	337	0
Marat	5.793	5245	2799	1067	1005	453	0
April	5.405	4681	2045	937	846	319	54
Mei	2.162	5186	2375	967	949	356	76
Juni	204	5207	2190	855	922	329	72
Juli	10.584	4.727	3977	864	651	317	48
Agustus	6.873	3679	1799	690	408	235	62
September	8.370	4.623	1882	940	563	318	44
Oktober	8.977	4.678	2174	991	724	346	64
November	8.775	4759	1983	943	668	303	119
Desember	8.601	4783	1824	953	666	309	66
Total	111.504	58.470	28.178	11.174	9.085	3.990	607

Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher, 2012

Dari data di atas terlihat bahwa selama tahun 2012, dari total pelayanan rawat jalan sebesar 111.504 kunjungan, terdiri dari kunjungan pasien Askes, Umum, Jamkesmas, Jamkesda, Astek dan gratis. Terbanyak jumlah pasien Askes disusul pasien umum dan Jamkesmas.



Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah pasien rawat inap pada RSUD Rd. Mattahe Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25.
Jumlah Pasien Rawat Inap RSUD Raden Mattahe Jambi Tahun 2012

Bulan	Total Pelayanan	umum	askes	Jamkesmas	astek	jamkesda
Januari	1.718	336	440	484	75	383
Februari	1.458	267	393	463	42	293
Maret	1.524	232	450	493	37	312
April	1.450	250	410	467	40	283
Mei	1.515	252	412	465	51	335
Juni	1.368	263	352	436	48	269
Juli	1.489	293	399	532	34	231
Agustus	1.267	306	366	417	34	144
September	1.483	354	431	427	35	236
Oktober	1.530	331	415	502	30	252
November	1.432	318	428	402	38	246
Desember	1.536	302	439	485	41	269
Total	17.770	3.504	4.935	5.573	505	3.253

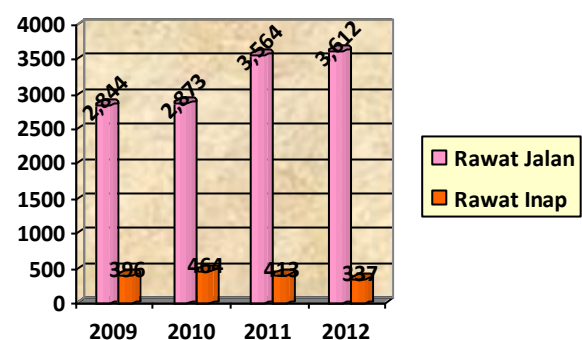
Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattahe, 2012

Dari data di atas terlihat bahwa selama tahun 2012, dari total pelayanan rawat inap sebesar 17.770 orang, terdapat 5.573 orang atau sebesar 31,36% pasien yang menggunakan kartu Jamkesmas dan 3.253 orang atau sebesar 18,31% pasien yang menggunakan fasilitas Jamkesmasda.

Selain RSUD Rd. Mattahe Jambi, Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Jambi sebagai salah satu unit layanan kesehatan umum dan jiwa telah menjalankan maklumat tersebut dengan baik. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari jumlah kunjungan pasien tidak mampu/miskin yang dilayani oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan di tahun 2012 berupa pembangunan Gedung rawat inap kelas III (Dana APBD, Dana DAK), jalan lingkungan & IPAL, pembuatan wastafel ruangan rawat inap kelas III (Gama, MPKP, Arjuna, Srikandi, PICU). Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ruang rawat inap bagi pasien kurang mampu/miskin yang memiliki kartu jamkesmas.

Grafik Kunjungan Pasien Jamkesmas Tahun 2009 - 2012



Grafik 3.5.
Kunjungan Jamkesmasprov/da di RSJD



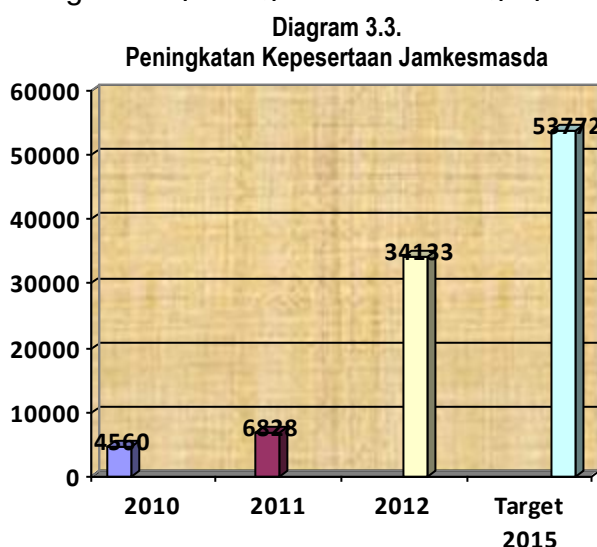
Selanjutnya, untuk melihat perkembangan capaian kinerja peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dalam pemberian Jamkesmasprov/da dari tahun ke tahun, maka berikut ini disajikan indikator dan perbandingan tingkat capaiannya selama 2 (dua) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.26.
Perkembangan Capaian kinerja peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dalam pemberian Jamkesmasda Provinsi Jambi Tahun 2012

No.	Indikator Kinerja	Tahun		
		2010	2011	2012
1.	Kepesertaan masyarakat yang mendapat jaminan sosial jamkesmasda Provinsi Jambi (SAMISAKE).	19.629 Org	6.828 Org	34.133 Org

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

Berdasarkan tabel tersebut, tercatat dalam 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan dari segi jumlah. Pada tahun 2010 peserta jumlah anggota Jaskesmasda 19.629 orang bertambah sebesar 6.828 orang pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 telah mencapai 34.133. Kinerja tersebut dapat terwujud tentunya tidak terlepas dari program dan kegiatan yang terkait dengan perencanaan baik dan sudah menjadi prioritas program Gubernur Jambi disamping sudah targetkan dalam SPM bidang kesehatan oleh Pemerintah dan disesuaikan dengan kewenangan Provinsi Jambi.



3.2.2.2.2. Indikator Kinerja Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita

Penanganan pangan dan gizi merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional. Pangan dan gizi terkait langsung dengan status kesehatan masyarakat. Perwujudan ketahanan pangan dan gizi tidak dapat dilepaskan dari upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan individu dan masyarakat, serta peningkatan daya saing SDM, yang selanjutnya menjadi daya saing bangsa. Indonesia telah berada dalam jalur yang benar (*on track*) untuk mencapai MDGs.



Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang kesehatan No 36 tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010 -2014 telah menetapkan 4 sasaran pembangunan kesehatan yaitu 1). Meningkatkan umur harapan hidup, 2). Menurunkan angka kematian bayi, 3). Menurunkan angka kematian ibu dan 4) Menurunkan prevalensi gizi kurang. Besaran masalah gizi masyarakat diukur dengan mengukur status gizi anak balita berdasarkan indeks Berat badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dan Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB).

Persentase jumlah kasus balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.27.
Jumlah Kasus Gizi Buruk di Provinsi Jambi Tahun 2012

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KASUS	JUMLAH KASUS DIRAWAT	PERSENTASE KASUS DIRAWAT	JUMLAH MENINGGAL
1	KERINCI	7	7	100	0 ORANG
2	SEI. PENUH	6	6	100	1 ORANG
3	MERANGIN	14	14	100	0 ORANG
4	SAROLANGUN	34	34	100	0 ORANG
5	BUNGO	3	3	100	0 ORANG
6	TEBO	9	9	100	1 ORANG
7	BATANGHARI	17	17	100	1 ORANG
8	TANJAB TIMUR	7	7	100	0 ORANG
9	TANJAB BARAT	1	1	100	0 ORANG
10	KOTA JAMBI	29	29	100	1 ORANG
11	MUARO JAMBI	11	11	100	0 ORANG
	PROVINSI	138	138	100	4 ORANG

Sumber : Laporan Bulanan Kasus Gizi Buruk Kabupaten/Kota Tahun 2012

Pada tabel tersebut dapat dilihat jumlah kasus gizi buruk di Provinsi Jambi tahun 2012 sebanyak 138 kasus dan sebanyak 4 orang meninggal. Semua kasus gizi buruk mendapat perawatan (100%), adapun perawatan yang diberikan berupa rawat inap atau rawat jalan. Bagi penderita pasca perawatan pemerintah Provinsi Jambi memberikan bantuan berupa formula pemulihan yang diberikan kepada 33 anak dan Kabupaten/kota memberikan bantuan kepada 105 anak. Jumlah



penderita gizi buruk yang meninggal pada tahun 2012 (4 orang) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 (7 orang).

Penyebab terjadinya kasus gizi buruk pada balita di Provinsi Jambi disebabkan oleh masalah konsumsi yang kurang dan atau adanya infeksi seperti : kecacingan, pneumoni, kelainan syarat, TB paru, hidrocephalus, brain atropi, microcephalus, kelainan jantung dan down sindrom. Masalah lain yang ditemukan masih rendahnya kemampuan dan pengetahuan orang tua dalam mengasuh anak terutama dalam hal pemberian makan, kesehatan perorangan dan kesehatan lingkungan akibat kemiskinan.

Pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita di Provinsi Jambi yang bertujuan memantau peningkatan pelayanan gizi sesuai dengan Prosedur Pemantauan Pertumbuhan Balita dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.28.
Hasil Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan Balita
di Provinsi Jambi Tahun 2012

NO	KABUPATEN/ KOTA	JMH BAYI < 6 BLN	JMLH BAYI 6 – 11 BLN	JUMLAH BALITA 1 < 5 THN	S	K	D	N
1.	KERINCI	2.272	2.374	27.795	32.441	28.593	17.461	16.585
2.	SUNGAI PENUH	719	1.060	7.305	9.084	9.075	7.466	6.961
3.	MERANGIN	4.554	4.554	33.757	32.404	30.144	20.084	16.307
4.	SAROLANGUN	3.072	3.123	18.561	22.897	22.897	22.897	19.852
5.	BATANG HARI	2.611	2.600	19.768	25.015	19.954	16.922	12.439
6.	MUARO JAMBI	4.108	4.103	27.457	29.542	29.542	25.879	22.773
7.	TANJAB TIMUR	2.040	1.662	16.822	18.489	16.827	14.139	12.754
8.	TANJAB BARAT	2.797	3.361	17.807	23.965	21.415	18.407	16.751
9.	TEBO	2.823	3.113	22.757	31.034	29.385	17.067	14.351
10.	BUNGO	3.357	3.846	22.736	31.144	29.390	22.334	17.960
11.	JAMBI	5.364	5.727	46.153	44.961	44.961	28.090	21.997
	PROVINSI	33.717	35.523	260.918	300.976	282.183	210.746	178.730

Sumber : Laporan Bulanan Gizi Kabupaten/Kota Tahun 2012

NO	KABUPATEN/ KOTA	D'	BGM	2T	D/S	N/D'	N/S	K/S	BGM/ D
1.	KERINCI	16.790	7	80	53,82	98,78	51,12	88,14	0,04
2.	SUNGAI PENUH	7.161	11	88	82,19	97,21	76,63	99,90	0,15
3.	MERANGIN	17.184	84	316	61,98	94,90	50,32	93,03	0,42
4.	SAROLANGUN	21.751	-	-	100,00	91,27	86,70	100	-
5.	BATANG HARI	14.599	84	234	67,65	85,20	49,73	79,77	0,50
6.	MUARO JAMBI	24.228	-	408	87,60	93,99	77,09	100	-
7.	TANJAB TIMUR	13.189	83	89	76,47	96,70	68,98	91,01	0,59
8.	TANJAB BARAT	17.180	75	139	76,81	97,50	69,90	89,36	0,41



9.	TEBO	15.151	86	209	54,99	94,72	46,24	94,69	0,50
10.	BUNGO	19.254	289	164	71,71	93,28	57,67	94,37	1,29
11.	JAMBI	24.627	323	634	62,48	89,32	48,92	100	1,15
	PROVINSI	191.114	1.042	2.361	70,02	93,52	59,38	93,76	0,49

Pada tabel diatas dapat dilihat hasil pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita di Provinsi Jambi tahun 2012 berupa cakupan partisipasi masyarakat (D/S) sebesar 70,02%, yang naik timbangannya (N/D') sebesar 93,52%, keberhasilan penimbangan (N/S) sebesar 59,38%, balita yang mempunyai KMS (K/S) sebesar 93,76 %, jumlah balita di Bawah Garis Merah (BGM) datang ke penimbangan (BGM/D) sebesar 0,49%. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menimbang balita pada tahun 2012 (70,02%) telah mencapai target indikator D/S (66%).

Tabel 3.29.
Perbandingan Capaian Kinerja Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita Tahun 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Prevalensi kekurangan gizi pada balita	92,00	92,00	93,00	93,52	100

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

3.2.2.2.3. Indikator Kinerja Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (Pn) adalah cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Dengan indikator ini dapat diperkirakan proporsi persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan dan ini menggambarkan kemampuan manajemen program KIA dalam pertolongan persalinan sesuai standar.

Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan (Pn) pada tahun 2012 sebesar 85,79% tidak mencapai target dimana target yang harus dicapai adalah 89%. Capaian pada tahun 2012 turun 5,31% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2011 yang besarnya adalah 91,10%. Pada tahun 2012 capaian Pn paling tinggi dicapai oleh Kota Sungai penuh (93,91%) dan capaian paling rendah oleh Kabupaten Tebo sebesar 81,16%. Pada tahun 2012 telah diadakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pencapaian Pn baik yang bersumber dari dana Dekon maupun dana APBD diantaranya :

1. Pertemuan koordinasi LP dalam pelaksanaan antenatal terpadu
2. Pertemuan evaluasi program kesehatan ibu



3. Perkembangan public private partnership dalam peningkatan cakupan PN dan Fasilitas kesehatan
4. Pemantapan dukungan organisasi perempuan dalam percepatan penurunan AKI
5. Pemantapan pelayanan KB pasca persalinan dan kontrasepsi darurat
6. Pemantapan pelaksanaan bagi pengelola program Kab/ Kota dan Puskesmas dalam Program P4K
7. Peningkatan pelaksanaan RR KB untuk Puskesmas
8. Validasi data program kesehatan ibu
9. Konsultasi program kesehatan ibu ke pusat
10. Monev program kesehatan ibu provinsi ke Kab/ kota
11. Monev program kesehatan ibu Kab/ Kota ke Puskesmas
12. Orientasi pelaksanaan kelas ibu hamil
13. Peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen aktif kala III
14. Peningkatan dukungan RS dalam pencegahan dan penanganan komplikasi
15. Penggandaan buku KIA

Tabel 3.30.
Perbandingan Capaian Kinerja Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
	Persalinan oleh tenaga kesehatan	85	85	89	85,79	96

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan telah dilakukan dalam program-program inovatif yang melibatkan lintas program dan lintas sektoral terkait maupun dengan pemberdayaan masyarakat. Saat ini meningkatnya pelayanan kesehatan bagi Ibu dan anak di Provinsi Jambi ditandai dengan menurunnya Indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA).

AKI secara Nasional sudah jauh menurun yaitu dari 307/100.000 KH pada tahun 2002-2003 menjadi 228/100.000 KH pada tahun 2007 dan AKB dari 35/1000 KH menjadi 34/1000 KH. Bila dilihat dari angka tersebut maka masih di perlukan kerja keras untuk mencapai sasaran MDGs 2015 yaitu AKI 102/100.000 KH dan AKB 23/1000 KH. Sementara itu untuk Provinsi Jambi, AKI adalah 228/100.000 KH, AKN 23/100KH, AKB 39/1000 KH dan AKABA 47/1000 KH. Namun demikian dalam upaya percepatan penurunan kematian Ibu dan Bayi di Provinsi Jambi masih diperlukan program-program yang berkesinambungan serta



inovatif. Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran dilakukan beberapa kegiatan APBD

3.2.2.2.4. Indikator Kinerja Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang Terakreditasi

Sesuai dengan undang-undang No.44 Tahun 2009, pasal 40 ayat 1, menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit **wajib** dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Namun pelaksanaan akreditasi rumah sakit bukan hal yang mudah, karena salah satu factor profesionalisme sumber daya manusia rumah sakit tentang pemahaman pelaksanaan akreditasi rumah sakit belum optimal. Pada tahun 2011 Rumah Sakit Pemerintah yang terakreditasi baru 50 % atau baru 7 rumah sakit dan tahun 2012 bertambah 3 rumah sakit lagi atau 66,6 % dari 15 Rumah Sakit Pemerintah yang ada di Provinsi Jambi. Artinya secara target untuk tahun 2012 rumah sakit yang terakreditasi sesuai target yang ditentukan yaitu 3 rumah sakit.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dilakukan beberapa kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan Akreditasi Rumah Sakit dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Perorangan
2. Kegiatan penilaian Lomba RS Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB)

Dengan demikian sangat diharapkan kerjasama secara lintas program dan lintas sektoral dari berbagai stake holder (Tim KARS, Ditjen Bina Upaya Kesehatan Rujukan). Di Provinsi Jambi sendiri sudah terbentuk tim pembina akreditasi rumah sakit yang melibatkan berbagai stake holder guna mendukung pelaksanaan akreditasi di rumah sakit, pada tahun 2012 telah membimbing 10 rumah sakit Pemerintah hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.31.
Data Rumah Sakit Yang Sudah Ter-akreditasi
Dan Yang Belum Ter-akreditasi di Provinsi Jambi Tahun 2012

No	Nama Rumah Sakit	Terakreditasi	Belum Terakreditasi	Keterangan
1	RSUD Raden Mattaher Jambi	√		12 pelayanan Tahun 2010
2	RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi	√		5 pelayanan Tahun 2011
3	RSUD H. Abdoel Madjid Batoe Kab. Batanghari	√		5 pelayanan Tahun 2011
4	RSUD KH Daud Arif Kabupaten Tanjab. Barat		√	Bimbingan akreditasi Provinsi
5	RSUD H. Hanafie Kab. Bungo	√		5 pelayanan Tahun 2011
6	RSUD ST. Taha Saifudin Kab. Tebo		√	-



7	RSUD Kolonel Abundjani Kab. Merangin	√		Bimbingan akreditasi Provinsi
8	RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain Kab. Sarolangun		√	Bimbingan akreditasi Provinsi
9	RSUD Mayjen H. A Thalib Kab. Kerinci	√		Bimbingan akreditasi Provinsi
10	RSUD Ahmad Ripin Kab. Muaro Jambi	√		Bimbingan akreditasi Provinsi
11	RSUD Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur		√	-
12	RSUD Sungai Bahar Muaro Jambi		√	-
13	RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi	√		5 pelayanan Tahun 2011
14	RS Bhayangkara Jambi	√		5 pelayanan Tahun 2010
15	RS DR. Bratanata Jambi	√		5 pelayanan Tahun 2010 12 pelayanan Tahun 2011

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 ada 4 (empat) rumah sakit Pemerintah yang terakreditasi yaitu :

1. RSUD Abdul Manap Kota Jambi
2. RSUD H.Abdoel madjid Batoe Kab.Batanghari
3. RSUD H.Hanafie Kab Bungo
4. RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi

Sedangkan tahun 2012 ada 3 (tiga) rumah sakit Pemerintah yang terakreditasi yaitu :

1. RSUD Mayjend H. A.Thalib Kabupaten Kerinci
2. RSUD Kol.Abundjani Kabupaten Merangin
3. RSUD H. Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi

Jadi jumlah rumah sakit Pemerintah yang terakreditasi sampai tahun 2012 sebanyak 10 (sepuluh) rumah sakit atau sekitar 66,6 % dari jumlah 15 rumah sakit Pemerintah se Provinsi Jambi, sementara target yang ditentukan untuk tahun 2013 adalah penambahan akreditasi bagi 3 Rumah Sakit, dan rumah sakit yang dilakukan pembinaan dan bimbingan dari tim pembina akreditasi rumah sakit provinsi antara lain adalah :

1. RSUD Prof. DR. HM. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun
2. RSUD Kol. Abundjani Kabupaten Merangin
3. RSUD Mayjend H.A Thalib Kabupaten Kerinci

Faktor yang menyebabkan belum terakreditasinya RSUD Prof. DR. HM. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 ini dikarenakan setelah diberikan bimbingan akreditasi oleh Tim Akreditasi Provinsi Jambi, rekomendasi dari Tim Akreditasi Provinsi Jambi tidak ditindak lanjuti oleh Pihak RSUD Prof. DR. HM. Chatib Quzwain, sehingga sampai tahun 2012 ini RSUD Prof. DR. HM. Chatib Quzwain belum terakreditasi.



Tabel 3.32.
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Rumah Sakit Pemerintah
Yang Terakreditasi Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Persentase Rumah Sakit Pemerintah Yang Terakreditasi	50	50	60	66,6	111

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

3.2.2.2.4. Indikator Kinerja Persentase Puskesmas Yang Berkinerja Baik

Capaian persentase Puskesmas dengan kinerja yang baik dengan menilai Puskesmas yang melaksanakan Manajemen Puskesmas. Adapun Manajemen Puskesmas terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu : P1 (Perencanaan) , P2 (Lokakarya mini/ Lokmin) dan P3 (Evaluasi Kinerja Puskesmas). Pada tahun 2012 ada sebanyak 6 (enam) Kabupaten/ Kota yaitu yang telah memiliki Puskesmas dengan kinerja yang baik yaitu Kabupaten Tebo, Kabupten Bungo, Kabupten Tanjab. Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Ma. Jambi. Dengan demikian pada tahun 2012 pencapaian persentase Puskesmas dengan kinerja yang baik sebesar 63% dari 174 puskesmas yang ada di kabupaten/kota dalam provinsi Jambi (Data BPS tahun 2010) telah mencapai target, dimana targetnya adalah 60%. Hasil pencapaian ini naik sebesar 13% dari pencapaian pada tahun 2011. Peningkatan pencapaian ini didukung oleh kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD yaitu :

1. Pemilihan tenaga teladan di Puskesmas
2. Penilaian Puskesmas berprestasi
3. Perjalanan teladan ke Pusat
4. Koordinasi perencanaan program bina Gizi & KIA dan BOK tingkat provinsi
5. Konsultasi teknis ke pusat
6. Sosialisasi prgram BOK ke Kab/ Kota
7. Pembinaan/ monitoring dan evaluasi program bina gizi& KIA dan BOK
8. Rapat koordinasi Yankestradkom provinsi dengan Kab/Kota/ RS/PKM di Kabupaten

Tabel 3.33.
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Puskesmas Yang Berkinerja Baik
Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Persentase Puskesmas yang berkinerja baik	50	50	60	63	105

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012



3.2.2.3. Sasaran Terciptanya Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial

3.2.2.3.1. Indikator Kinerja Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sangat Sangat Miskin

Berdasarkan berita resmi yang diekspose BPS pada 2 Januari 2012 penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan di Provinsi Jambi dalam kurun 6 bulan dari Maret-September 2011 menurun sebesar 0,14% dari 271,67 ribu jiwa (8,42%) pada maret 2012 menjadi 8,28% atau 1,6 ribu. Begitu juga dengan jumlah angka pengangguran pada agustus tahun 2011 sebesar 60.169 Orang (BPS Agustus 2011) 4,24%, dari 1.495.167 Orang angkatan kerja (BPS Agustus 2011) dengan berbagai program kegiatan angka tersebut diakhir tahun 2012 dapat ditekan menjadi 47.295 orang (3,16%). Penurunan angka pengangguran tersebut melalui BPTT sebanyak 1.600 orang (1.040 orang dari anggaran APBD 560 orang dana APBN), melalui Job Fair 2.748 orang dapat terserap 100 % di awal triwulan I 2013 pada 55 perusahaan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan Program Satu Milyar Satu Kecamatan. Program ini pada prinsipnya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terbatas kemampuannya di 131 kecamatan, dengan kegiatan yaitu bedah rumah, pemberian beasiswa, bantuan UMKM, alsintan, sertifikat gratis, Jamkesmasda Provinsi, bantuan *dump truck* dan kendaraan roda 3, pelatihan tenaga kerja bagi KK miskin dan bantuan ternak sapi.

Pada tahun 2011, telah diberikan bantuan bedah rumah sebanyak 2.802 unit, sedangkan tahun 2012 sebanyak 3.837 unit, bea siswa tahun 2011 sebanyak 6.221 siswa dan tahun 2012 sebanyak 10.641 siswa, UMKM tahun 2011 sebanyak 500 penerima sebanyak 1.270 penerima pada tahun 2012, kendaraan roda 3 dari 10 unit tahun 2011 menjadi 44 unit pada tahun 2012. Pada tahun 2012 terdapat penambahan kegiatan yaitu bantuan Alsintan sebanyak 1.143 unit dan bantuan ternak sebanyak 16 ekor. Disamping kegiatan bantuan diatas, kita juga memberikan bantuan pemberian sertifikat gratis, yang sampai tahun 2012 sebanyak 207 persil.

Pemerintah Provinsi Jambi juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada perusahaan maupun BUMN/BUMD yang telah berpartisipasi dalam kegiatan bedah rumah melalui dana CSR, yang selama 2 tahun ini telah terealisasi sebanyak 680 unit, masing-masing 398 unit tahun 2011 dan 282 unit di tahun 2012.

Melalui Fasisilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (pendamping) telah terlaksananya fasilitasi manajemen bagi keluarga miskin sebanyak 1 kali dengan peserta 1500 orang. Kegiatan ini bersifat pendampingan yaitu



memberikan pelatihan manajemen usaha keluarga/kelompok bagi kube yang dibantu oleh Kementerian Sosial baik FM Desa maupun FM Kota. Keberhasilan dari program ini adalah menurunnya angka kemiskinan serta meningkatnya taraf hidup keluarga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya melalui pembinaan manajemen yang baik bagi usaha keluarga miskin.

Tabel 3.34.
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sangat Miskin Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Persentase rumah tangga sangat miskin	7,5	7,8	8	8,28	103

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

3.2.3. Analisis Capaian Kinerja Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri

Tabel 3.35.
Pengukuran Kinerja Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri

No.	Sasaran	Indikator	Kondisi awal RPJMD	Target Tahun 2012	Realisasi Tahun 2012	% Capaian
1.	Terciptanya iklim investasi yang kondusif dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan	– Nilai investasi PMA	– US\$	– US\$ 87.270	– US\$ 89.727	102
		– Nilai investasi PMDN	– Rp. 2,25 Trilyun	– Rp. 13,67 Trilyun	– Rp. 19,62 Trilyun	143
		– Nilai Ekspor	– US\$ 1.209.672	– US\$ 2.000.000	– US\$ 1.741.000	87,05
		– Persentase koperasi aktif	– 69,49	– 72	– 72	100
		– Unit usaha mikro dan kecil	– 3.275 unit	– 3.260 unit	– 4.179 unit	128
2.	Terselenggara nya promosi daerah melalui peningkatan kepariwisataan daerah	– Pertumbuhan industri pariwisata	– 23	– 25	– 25	100
		– Peningkatan jumlah kunjungan wisata	– 1.110.000 wisatawan	– 1.150.000 wisatawan	– 1.278.240 wisatawan	111
3.	Terselenggara nya pembangunan pertanian dan	– Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	– 27,9	– 29	– 29,4	100



ketahanan pangan dalam pemenuhan pangan daerah	– Persentase nilai tukar petani	– 96	– 98	– 89,45	91,28
	– Ketersediaan energi/kap/perhari dan Persentase pola pangan harapan (PPH)	– 3.409	– 3.250	– 3.425	106

3.2.3.1. Sasaran Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif Dengan Reformasi Kelembagaan Ekonomi Di Berbagai Tingkatan

3.2.3.1.1. Indikator Kinerja Nilai Investasi PMA dan Nilai Investasi PMDN

Pelaksanaan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama bertujuan untuk menumbuhkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif sehingga terciptanya kemitraan dunia usaha, kemitraan antar usaha dalam rangka pengembangan penanaman modal di Provinsi Jambi. Upaya mewujudkan sasaran dari program peningkatan promosi dan kerjasama ini, Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

- Kegiatan Peningkatan Kerjasama strategis (kemitraan) untuk pengembangan investasi dan pemutakhiran data informasi investasi daerah,
- Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal,
- Kegiatan peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal,
- Kegiatan Pameran dan Temu usaha di dalam negeri; Kegiatan Pameran dan Temu usaha di Luar Negeri,
- Kegiatan Pembuatan Video Profile Peluang Investasi di Provinsi Jambi.

Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Kecil Menengah mempunyai tujuan agar terjalinnya kerjasama antara Pengusaha besar dengan UMKM, dengan bentuk kegiatan berupa Temu Usaha kemitraan antara usaha besar dengan UMKM. Temu Usaha Kabupaten dalam Provinsi Jambi yaitu : Kabupaten Batanghari dan Sarolangun dengan jumlah peserta pada masing-masing kabupaten sebanyak 100 pengusaha besar, kecil dan menengah. Dalam pertemuan tersebut di atas terinventarisir permasalahan mengenai terbatasnya permodalan dan akses ke sumber-sumber permodalan, lemahnya dalam organisasi dan manajemen serta kelemahan akses pasar.

Guna mengatasi masalah diatas perlu adanya peningkatan kualitas UMKM baik dari sisi permodalan maupun kualitas SDM yang berkaitan dengan UMKM tersebut. Fasilitasi koordinasi Kerjasama Bidang Penanaman Modal yaitu dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal (RKPPMD) di seluruh Kabupaten dan Kota yang hasilnya dikoordinasikan dan sinkronisasikan kembali pada Rapat Koordinasi



Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal (RKPPMD). Dari kegiatan tersebut dihasilkan kesepakatan sebagai berikut :

- a. Penyelesaian Rencana Tata Ruang/ Wilayah masing-masing Kabupaten/ Kota (kejelasan peta pengembangan/peruntukan tanah) harus ditindaklanjuti secara intensif guna sinkronisasi perencanaan penanaman modal lintas instansi, Kabupaten/ Kota dan Provinsi.
- b. Keberadaan kelembagaan PTSP harus diperkuat dengan pelimpahan/ pendelegasian kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan dari daerah masing-masing.
- c. Teknologi informasi yang ada harus dimaksimalkan penggunaannya dalam melakukan promosi investasi daerah.
- d. Data potensi daerah dan integrasi pendataan aktivitas penanaman modal di seluruh Kabupaten/ Kota dan Provinsi harus selalu di updating setiap tahunnya guna memberikan informasi terbaru kepada pihak investor dan yang memerlukan.
- e. Komunikasi intensif dengan pengusaha dan investor yang telah melakukan MoU melalui Koordinasi yang berkesinambungan antara Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pusat dalam hal promosi dan kerjasama investasi.

Kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yaitu pemantauan dan pembinaan terhadap PMDN/PMA di Provinsi Jambi dengan hasil pemantauan sebanyak 100 perusahaan PMDN/PMA. Selain itu dalam kegiatan ini dilaksanakan penyusunan Buku Laporan perkembangan pelaksanaan penanaman modal. Perkembangan Investasi pada tahun 2011 sebesar Rp. 15.23 Trilyun, sampai dengan akhir September 2012 Meningkat menjadi Rp. 19.62 Trilyun (dalam bentuk rupiah). Sedangkan dalam bentuk dollar mengalami penurunan, pada tahun 2011 sebesar US \$91.82 juta menjadi US\$ 89.72 Juta pada tahun 2012. PMDN dengan rencana investasi sebesar Rp. 82.96 triliyun terealisasi sebesar Rp19.62 triliyun, rencana investasi PMA dalam bentuk Rupiah ditargetkan sebesar Rp 8.36 triliyun dengan realisasi Rp. 6.58 triliyun, rencana investasi PMA ditargetkan sebesar US \$ 1.810.395.210,- dengan realisasi sebesar US \$ 89.727.360.

Peningkatan promosi produk unggulan dan peluang investasi Provinsi Jambi melalui kegiatan pameran agar Sektor Unggulan daerah Provinsi Jambi terpromosi dengan baik. Adapun beberapa kegiatan yang telah diikuti antara lain :

1. Jambi Emas Expo pada bulan Februari 2012,
2. Pameran Otonomi Expo yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan Mei 2012,
3. Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) I yang dilaksanakan di Padang pada Bulan Juni 2012,



4. Gelar Investasi dan Potensi Daerah yang dilaksanakan di Yogyakarta pada bulan Oktober 2012,
5. Pameran Aktivasi dan Publikasi Province Profile yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan November 2012,
6. Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) II yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan November 2012,
7. Silaknas Conference & Expo ICMI yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan Desember 2012.

Promosi produk unggulan dan peluang investasi provinsi Jambi di luar negeri, salah satunya dengan mengikuti Pasar Malam Indonesia di Belanda pada tanggal 27 Maret s.d 02 April 2012, untuk mempromosikan potensi wisata, perdagangan, investasi, dan seni budaya serta kuliner beberapa daerah di Indonesia kepada masyarakat Indonesia yang telah bermukim di Belanda maupun kepada masyarakat Belanda pada umumnya. Dari hasil pelaksanaan tersebut, ada beberapa calon investor yang tertarik menanamkan modalnya di Provinsi Jambi.

Selain itu ada beberapa kegiatan yang Luar Negeri yang diikuti :

1. Investment Promotion Forum: Regional Potential Investment Opportunities yang dilaksanakan di Guangzhoo, Tiongkok pada tanggal 12 s.d 18 Maret 2012.
2. Undangan Business Meeting, dilaksanakan di Ube City Yamaguchi, Jepang pada tanggal 1 s.d 7 September 2012.
3. Pameran International Trade Malaysia (Intrade) 2012 di Kualalumpur pada tanggal 27 s.d 29 November 2012.

Selanjutnya dilaksanakan pembuatan Video Profile Peluang Investasi dan Penyusunan data Peluang Investasi Daerah di Provinsi Jambi untuk menggali potensi Investasi yang akan dikembangkan di Provinsi Jambi dalam upaya memacu laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, sehingga dapat memberikan masukan kepada para calon Investor serta meningkatnya investasi di Provinsi Jambi.

Selain itu, pelaksanaan koordinasi Pembinaan Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi dilakukan dengan Inventarisasi Izin-izin yang dimiliki oleh Perusahaan (berupa SIUP, IUP, APIT, IMTA dan Izin-izin yang diberikan oleh Kab./Kota. Selama Tahun 2012 pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal sudah menerbitkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perizinan dan non-perizinan yang terdiri dari 18 (delapan belas) perizinan dan 57 (lima puluh tujuh) non-perizinan.

Pada tahun 2012 ini Provinsi Jambi melalui Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi telah berhasil menjadi





Nominee **Penyelenggara PTSP Provinsi terbaik ke-4 Tahun 2012 se-Indonesia**. Dengan keberhasilan ini diharapkan kedepannya BPMD dan PPT Provinsi Jambi dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga meningkatkan minat masyarakat dalam hal ini para investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jambi.

Tabel 3.36.
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Investasi PMA dan
Nilai Investasi PMDN Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Investasi PMA		US\$ 91,820	US\$ 87.270	US\$ 89.727	102
2.	Investasi PMDN	2,25 Trilyun	3,65 Trilyun	13,67 Trilyun	19,62 Trilyun	143

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

3.2.3.1.2. Indikator Kinerja Nilai Ekspor

Dalam rangka meningkatkan nilai ekspor, telah dilaksanakan program peningkatan dan pengembangan ekspor yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor non migas Provinsi Jambi baik volume maupun nilai ekspor, sehingga apabila nilai ekspor Jambi meningkat akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus juga membuka lapangan pekerjaan dan mendatangkan devisa bagi negara.

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dilaksanakan melalui 2 kegiatan yang meliputi : 1) Kegiatan Pameran Luar Negeri dengan sasaran yang ditujukan kepada para perajin dan produk khas Jambi, dan 2) Forum Koordinasi peningkatan kinerja ekspor daerah. Adapun output dari beberapa kegiatan di atas yaitu :

- 1) Terselenggaranya Pameran Luar Negeri guna mempromosikan produk/komoditi Jambi dan mencari peluang pasar baru, terciptanya interaksi bisnis antara pedagang luar negeri dengan pedagang daerah sehingga dapat terjalin kerjasama yang saling menguntungkan, pameran tersebut dilaksanakan di Pasar Malam Indonesia (PMI) 2012 pada tanggal 29 Maret – 1 April 2012 di Lapangan Malavela Den Haag Belanda,
- 2) Terselenggaranya Forum Koordinasi peningkatan kinerja ekspor daerah sebanyak 3 kali dengan peserta 150 orang.

Dari sisi ekspor, realisasi nilai ekspor non migas tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 26,95 persen dari US\$ 2.384 juta menjadi US\$ 1.741 juta, bila

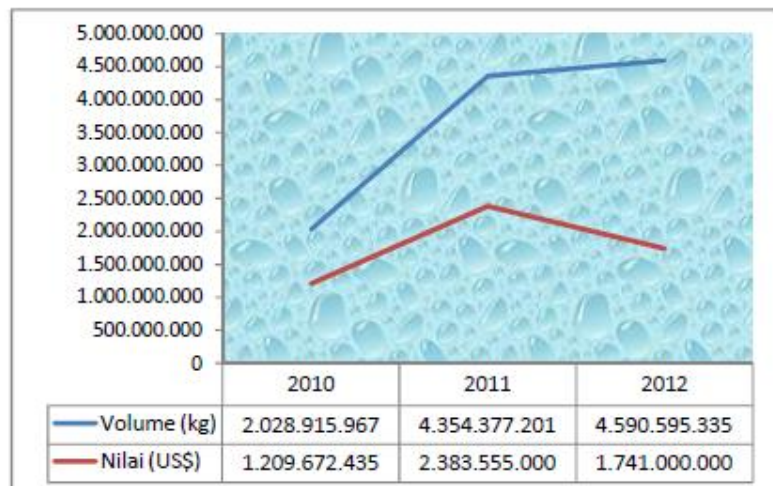


dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun 2011. Secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik 3.6. berikut.

Penurunan nilai tersebut terutama disebabkan karena penurunan nilai ekspor yang cukup signifikan dari Kelompok Pertanian terutama komoditi Pinang sebesar 48,95 persen dan Kelompok Industri terutama komoditi Karet Olahan sebesar 45,27 persen dan Minyak Nabati sebesar 38,65

persen. Kinerja tersebut tidak terlepas dari perkembangan permasalahan ekonomi yang terjadi di AS dan Kawasan Eropa serta menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama Indonesia sehingga berimplikasi terhadap kinerja ekspor dan impor Provinsi Jambi.

Grafik 3.6. Realisasi Nilai Ekspor



Sedangkan komoditi ekspor Provinsi Jambi masih didominasi oleh komoditi Karet, Minyak Nabati (CPO dll) dan Pulp dan kertas/pulp. Adapun negara tujuan utama ekspor komoditas dari Provinsi Jambi selama tahun 2012 mencapai 13 negara, dengan 6 negara tujuan utama ekspor Thailand, Jepang, China, Malaysia, Singapura dan India.

Tabel 3.37.
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Ekspor Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Peningkatan Nilai Ekspor	US\$ 1.209.672	US\$ 2.383.555	US\$ 2.000.000	US\$ 1.741.000	87,05

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

3.2.3.1.3. Indikator Kinerja Persentase Koperasi Aktif

Melalui Program Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi yang bertujuan meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif. Secara organisasi usaha, diharapkan memiliki daya saing ekonomi sebanding dengan badan usaha lainnya. Dengan demikian diharapkan



kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder tertata dan berfungsi dengan baik; infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas; lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri; serta praktek berkoperasi yang baik (*best practices*) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas.

Untuk mendukung program tersebut, maka telah dilaksanakan kegiatan strategis sebagai berikut :

1. Pengembangan jaringan kemitraan Usaha Koperasi,
2. Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Koperasi,
3. Pembinaan dan Pengembangan Kader Koperasi,
4. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi,
5. Peningkatan Kualitas Produk Usaha Anggota Koperasi.

Adapun output dari beberapa kegiatan ini yaitu :

1. Terlaksananya Pengembangan Jaringan Kemitraan Usaha Koperasi di 11 kab/kota;
2. Terselenggaranya Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi di 11 Kab/Kota;
3. Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kader Koperasi di 11 Kabupaten/Kota;
4. Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi di 11 Kab/Kota;
5. Terlaksananya Peningkatan Kualitas Produk Usaha Anggota Koperasi bagi 11 Kabupaten/Kota.

Capaian dari program ini terbangunnya jaringan kemitraan usaha koperasi di Provinsi Jambi serta terwujudnya kader koperasi yang handal, yang dapat memberikan pengalamannya dalam mengelola koperasi. Indikator keberhasilan dari program ini yaitu dengan meningkatnya perkembangan jumlah koperasi aktif sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.38. Jumlah Koperasi Aktif

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012
1	Jumlah Koperasi	Unit	3.275	3.306	3.443
2	Koperasi Aktif	Unit	2.368	2.401	2.211
3	Koperasi Tidak Aktif	Unit	907	905	1.232
4	Jumlah Anggota	Orang	353.028	353.758	357.893
5	Koperasi yg melaksanakan RAT	Unit	902	983	1.043
6	Jumlah Manajer	Orang	510	510	605
7	Modal Sendiri	Rp	258.703.358	262.918.598	377.986.269
8	Modal Luar	Rp	256.608.385	233.417.442	396.625.500
9	Volume Usaha	Rp	1.167.622.089	1.172.517.960	1.772.174.220
10	Sisa Hasil Usaha	Rp	48.638.159	62.688.546	54.225.221

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi



Pada tahun 2012 koperasi mengalami peningkatan sebesar 4% menjadi 3.443 unit koperasi, namun jumlah koperasi yang tidak aktif cukup besar yaitu sekitar 35% dari total koperasi yang ada. Adapun indikator keberhasilan lainnya yaitu dengan terpilihnya beberapa Koperasi di Provinsi Jambi, yang mendapat prestasi di tingkat nasional, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3.39.
Prestasi Koperasi

No	Kelompok>Nama Koperasi	Prestasi	Kelompok Koperasi	Alamat
1.	KPN Koperasi Serba Usaha Perikanan	Terbaik ke 3 Tk. Nasional	Simpan Pinjam	Kantor Dinas Kelautan Perikanan Prov. Jambi, Tl. Pura
2.	KUD Sawit Kita	Terbaik ke 3 Tk. Nasional	Konsumen	Kec. Renah Mendalu Kab. Tanjab. Barat
3.	KUD Budi Sari	Terbaik ke 6 Tk. Nasional	Jasa	Kec. Mero sebo Ilir Kab. Batang Hari

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi

Perbandingan kinerja persentase koperasi aktif dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.40.
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Koperasi Aktif Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Persentase koperasi aktif	69,49	71,50	72	72	100

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

3.2.3.1.4. Indikator Kinerja Peningkatan Unit Usaha Mikro dan Kecil

Melalui Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah yang bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan serta meningkatkan profesionalisme SDM guna



meningkatkan daya saing UMKM. Adapun kegiatan yang mendukung program ini yaitu :

- a. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kemitraan di Provinsi Jambi,
- b. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan bagi KUKM,
- c. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD,
- d. Sosialisasi dan Pelatihan Pola Pengelolaan Limbah Batik dan HKI di Provinsi Jambi,
- e. Pendataan dan Pemuktahiran Data UMKM se Provinsi Jambi,
- f. Pelatihan Manajemen Usaha Kecil.

Adapun output dari program/kegiatan ini yaitu :

- a. Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kemitraan di Provinsi Jambi sebanyak 100 UMKM,
- b. Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan bagi KUKM bagi 50 orang pelaku usaha kecil,
- c. Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD bagi 50 orang pengurus koperasi,
- d. Terselenggaranya Sosialisasi dan Pelatihan Pola Pengelolaan Limbah Batik dan HKI di Provinsi Jambi 50 orang peserta Batik dan 100 orang peserta HKI,
- e. Terselenggaranya Pendataan dan Pemuktahiran Data UMKM se Provinsi Jambi sebanyak 11 Kab/Kota,
- f. Terlaksananya Pelatihan Manajemen Usaha kecil bagi 50 orang.

Capaian dari program ini yaitu terwujudnya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah serta Koperasi secara dinamis dan berkelanjutan. Hal tersebut digambar dari peningkatan jumlah koperasi dari 3.275 unit di tahun 2010 menjadi 3.306 pada tahun 2011 atau naik sebesar 0,94%, sedangkan Target RPJMD tahun 2012 sebanyak 3.260 unit koperasi. Sedangkan untuk Koperasi yang dapat melaksanakan RAT juga mengalami peningkatan sebesar 8,98% dari 902 pada tahun 2010 Koperasi menjadi 983 pada tahun 2011, jumlah tersebut sekaligus telah melampaui target dalam RPJMD Provinsi, dimana pada tahun 2012 ditetapkan sebanyak 873 koperasi.

Tabel 3.41.
Perbandingan Capaian Kinerja Peningkatan Jumlah Unit Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Peningkatan jumlah unit usaha mikro dan kecil	3.275	3.306	3.260	4.179	128

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012



3.2.3.2. Sasaran Terselenggaranya Promosi Daerah Melalui Peningkatan Kepariwisata Daerah

3.2.3.2.1. Indikator Kinerja Pertumbuhan Industri Pariwisata dan Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata

Kebudayaan merupakan bagian penting dalam pembangunan karena terkait dengan persoalan karakter dan mental bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan. keberhasilan pertumbuhan industri pariwisata yang pada akhirnya nanti akan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisata, maka Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi telah mengikuti bahkan menyelenggarakan event-event promosi daerah, diantaranya :

1. Menyelenggarakan Event Daerah, seperti : Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci (FMPDK), Jambi Emas Expo, Karnaval Budaya Hut Jambi, Hari Pers Nasional, Perkempinas di Kabupaten Muaro Jambi, Kemilau sumatera dan Pekan Pesona Budaya Jambi, berupa pameran objek pariwisata dan budaya serta tampilan kesenian yang telah di ikuti oleh provinsi se-sumatera
2. Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah, berupa :
 - a. Pendataan di Situs Percandian Muaro Jambi di antaranya ; bekerjasama dengan Badan Geologi Kementrian ESDM padabulan Agustus, bekerjasama dengan Balai Pelestarian cagar Budaya Provinsi Jambi bulan september, telah dilaksanakan pembuatan riview DED Candi Muaro Jambi bulan oktober s.d Desember 2012, telah dilaksanakan semninar Nasional situs Percandian Muaro Jambi menuju warisan dunia tanggal 2 s.d 4 desember 2012 dan telah pengadaan 4 unit perahu karet, 4 buah duplikat benda cagar budaya pada bulan oktober s.d Desember 2012.
 - b. Pendataan Situs Kepurbakalaan Merangin, menuju pengembangan menjadi Geo Park bersama tim Geologi Pusat pada 25 April s/d 02 Mei 2012.
3. Meningkatkan Fungsi Museum Negeri Jambi,
 - a. Pengadaan benda bercorak kebudayaan,
 - b. Pengadaan bahan konservasi, survei dan fumigasi koleksi,
 - c. Sarasehan Kesejarahan Jambi,
 - d. Pameran khusus Museum Negeri Jambi, dengan tema “ Jambi Elok Nian”, mampu menarik pengunjung 7.456 orang.
 - e. Lomba kreatifitas siswa, telah dilaksanakan Lomba Memasang Tangkuluk Tingkat SMA se-Kota Jambi dan Lomba Karya Tulis Ilmiah tentang koleksi Museum se- Kota Jambi,



4. Pengembangan Keragaman Budaya

Program pengembangan keragaman budaya telah mencapai kinerja dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah PMI (Pasar Malam Indonesia); telah dilaksanakan pengiriman duta kesenian dan tampilan kesenian di Den Haag Belanda,
- b. Kegiatan Gita Bahana Nusantara; telah dilaksanakan audisi gita bahana nusantara utusan kab/kota se Provinsi Jambi pada tanggal 11 s.d 12 Juni 2012 di Kota Jambi dan pengiriman 4 peserta pemenang ke tempat pemusatan latihan cibubur - Jakarta.
- c. Pekan Pesona Budaya Jambi di arena Gedung Olah Raga (GOS) dan Gedung Olah Seni (GOS) Kota Baru –Kota Jambi,
- d. Gebyar Wisata Nusantara
- e. Telah dilaksanakan apresiasi seni dan opera mini signjei di auditorium Museum Jambi

5. Pengembangan Kemitraan

Untuk program ini, capaian kinerja dilakukan dengan melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut :

- a. Workshop Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata; telah dilaksanakan workshop peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata yang berkelanjutan dan pembekalan pelaku pariwisata dengan peserta Kota Jambi, kab. Muaro Jambi, Kab. Merangin kab. Sarolangun, Kab. Kerinci dan kab. Tanjung Jabung timur,
- b. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (PNPM Mandiri Pariwisata); telah dilaksanakan peningkatan peran serta kelompok desa /masyarakat penerima bantuan dana PNPM.

Sebagai dampak dari banyaknya obyek wisata serta event-event yang dilaksanakan, salah satu indikator pendukung keberhasilan yang tergambar adalah adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan perkembangan usaha pariwisata di Provinsi Jambi. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2010 tercatat sebanyak 7.751 orang, terjadi peningkatan pada tahun 2011 sebanyak 8.543 orang (10,22%) dan pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan mencapai 9231 orang (8,05%).

Untuk kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) pada tahun 2010 sebanyak 957.760 orang, dan meningkat menjadi 1.122.350 orang pada tahun



2011 (17,19%) dan untuk tahun 2012 kunjungan wisatawan nusantara meningkat sebanyak 1.278.240 (13,89%). Kondisi ini membuktikan bahwa semakin membaiknya akses infrastruktur jalan menuju tempat-tempat wisata sangat mempengaruhi tingkat kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara, dan secara tidak langsung pula berdampak pada tumbuhnya industri pariwisata serta mendorong perekonomian industri kecil di Provinsi Jambi. Berikut ini merupakan statistik capaian indikator makro dan mikro dalam lingkup Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi :

Tabel 3.42.
Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Jambi

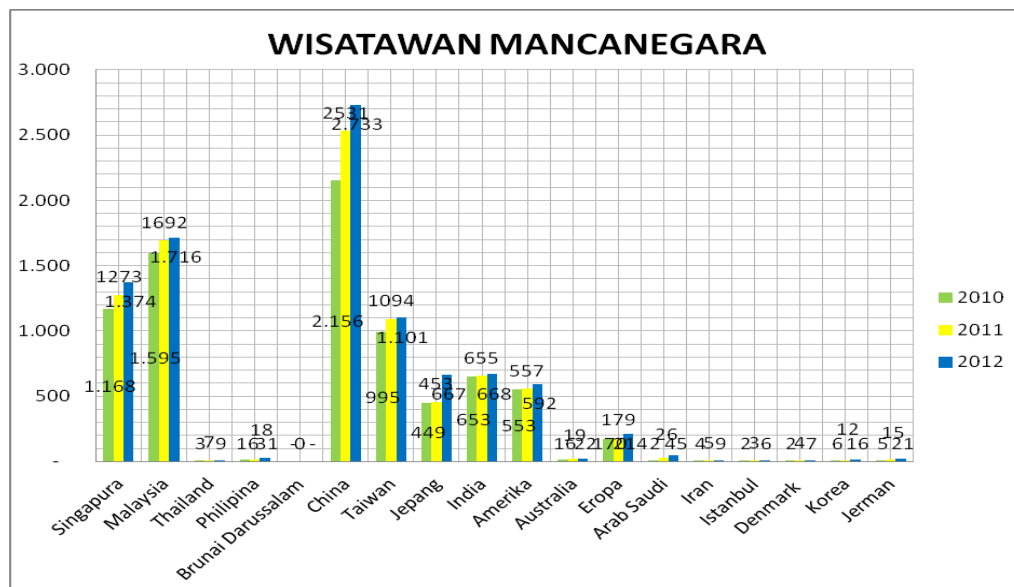
No	INDIKATOR	2010 (Orang)	2011 (Orang)	2012 (Orang)	%	KET
I	WISATAWAN					
a.	Mancanegara Terdiri dari :	7.751	8.543	9.231	8,05	Sumber data :
	1. Singapura	1.168	1.273	1.374	7,93	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/ Kota se- Provinsi Jambi 2. Jumlah Hotel di Kabupaten/ Kota se- Provinsi Jambi
	2. Malaysia	1.595	1.692	1.716	1,42	
	3. Thailand	3	7	9	28,57	
	4. Philipina	16	18	31	72,22	
	5. Brunei	-	-	-		
	6. China	2.156	2.531	2.733	7,98	
	7. Taiwan	995	1.094	1.101	0,64	
	8. Jepang	449	453	667	47,24	
	9. India	653	655	668	1,98	
	10. U S A	553	557	592	6,28	
	11. Australia	16	19	22	15,79	
	12. Eropa	170	179	214	19,55	
	13. Arab Saudi	2	26	45	73,08	
	14. Iran	4	5	9	80,00	
	15. Turki	2	3	6	100	
	16. Denmark	2	4	7	75,00	
	17. Korea	6	12	16	33,33	
	18. Jerman	5	15	21	40,00	
b.	Nusantara	957.760	1.122.350	1.278.240	13,89	
II.	H O T E L - Bintang - Melati	22 118	23 123	25 137	8,70 11,38	
III.	RESTORAN	42	53	105	98	
IV.	RUMAH MAKAN	415	572	540	(6)	Meningkat menjadi restoran
V.	BIRO PERJALANAN WISATA	51	56	70	25	

Sumber data ; Bidang destinasi Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi



Perkembangan jumlah kunjungan wisata dapat dilihat pada diagram berikut ini :

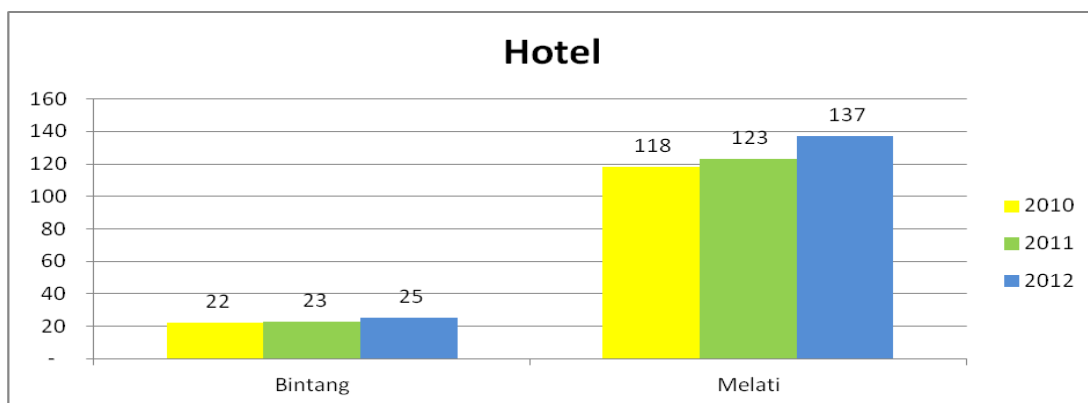
Diagram 3.4.
Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Tahun 2010 s.d 2012 ;



Sumber ; Bidang Destinasi, Dinas kebudayaan & Pariwisata provinsi Jambi tahun 2012

Dari meningkatnya perkembangan jumlah kunjungan wisatawan tersebut, berdampak pula pada peningkatan industri pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari tingkat hunian kamar hotel, restoran, rumah makan, dan biro perjalanan wisata.

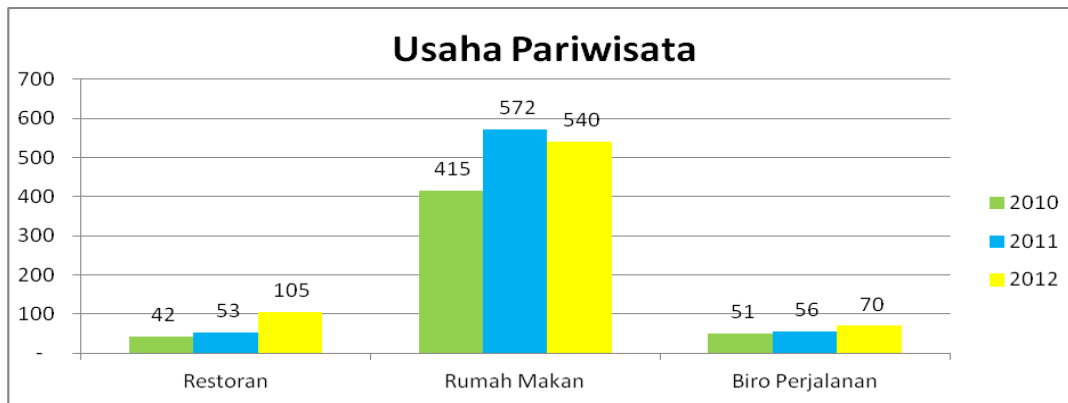
Diagram 3.5.
Persentase Peningkatan Hunian Hotel Tahun 2012



Sumber ; Bidang Destinasi, Dinas kebudayaan & Pariwisata provinsi Jambi tahun 2012



Diagram 3.6.
Persentase Peningkatan Industri Pariwisata Tahun 2012 ; Restoran, Rumah Makan dan Biro Perjalanan Wisata



Sumber ; Bidang Destinasi, Dinas kebudayaan & Pariwisata provinsi Jambi tahun 2012

Persentase peningkatan industri pariwisata ini semata-mata tidak terlepas dari jumlah potensi wisata yang ada, namun juga berasal dari kontribusi perusahaan yang menjalankan bisnisnya di Provinsi Jambi yang secara tidak langsung berdampak pada peningkatan hunian kamar hotel, restoran rumah makan dan lain-lain. Kondisi ini juga turut didukung oleh semakin membaiknya akses infrastruktur jalan menuju tempat-tempat wisata sehingga mempengaruhi tingkat kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara, dan secara tidak langsung pula berdampak pada tumbuhnya industri pariwisata serta mendongkrak perekonomian industri kecil di Provinsi Jambi.

3.2.3.3. Sasaran Terselenggaranya Pembangunan Pertanian dan ketahanan Pangan Dalam Pemenuhan Pangan Daerah

3.2.3.3.1. Indikator Kinerja Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan 5 program utama, yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Produksi Pertanian, Program Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur/ Sarana Prasarana Pertanian dan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil TPH (Domestik dan Internasional).

Dari program prioritas tersebut, pada tahun 2012 Provinsi Jambi mengalami peningkatan produksi padi sebesar 14.604 ton atau sebesar 2,26% jika dibandingkan tahun 2011, yaitu dari 646.640 ton GKG menjadi 661.244 ton



GKG pada tahun 2012 (ARAM II 2012). Kenaikan produksi padi ini terjadi karena adanya peningkatan produktivitas sebesar 0,46 Kw/Ha (1,11%), serta didukung oleh peningkatan luas panen sebesar 1.790 Ha (1,14%). Namun demikian, produktivitas tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, yaitu sebesar 44,85 Kw/Ha, sementara produktivitas yang telah dicapai adalah sebesar 41,53 Kw/Ha.

Komoditi Kedelai juga mengalami penurunan produksi pada tahun 2012 yaitu dari 5.669 ton pada tahun 2011 menjadi 3.853 ton, atau menurun sebesar 1.816 ton (32,03%), yang disebabkan karena penurunan luas panen seluas 1.506 Ha (33,00%), walaupun produktivitas kedelai yang mengalami peningkatan sebesar 0,18 Kw/Ha (1,45 %) dibanding tahun sebelumnya. Untuk komoditi jagung, terjadi peningkatan produksi jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2011 dari 25.522 ton menjadi 28.043 ton pada tahun 2012 atau mengalami peningkatan sebesar 2.522 ton (9,88)%. Peningkatan produksi jagung ini terjadi karena adanya penambahan luas panen sebesar 557 Ha (8,31%). Hal ini disebabkan petani mengalihkan minat menanam kedelai yang resiko gagalnya tinggi dan tidak adanya jaminan pasar, dan lebih menguntungkan menanam jagung.

Sementara itu, dari sisi Pendapatan Asli Daerah, target PAD dari hasil retribusi jasa usaha berupa retribusi penjualan produksi usaha daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.43.
Target dan Realisasi PAD Sektor Pertanian Tahun 2011 - 2012

dalam ribuanrupiah

No	BBI/Taman Anggrek	Tahun 2011			Tahun 2012			% Realisasi 2012 : 2011
		Sasaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sasaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	BBI Padi Sukajaya	56.000	50.036	100,1	56.000	56.471	100,8	112,8
2.	BBI Palawija Sebapo	45.000	47.370	105,3	45.000	45.180	100,4	95,3
3.	BBI Palawija Alai Ilir	-	-	-	-	-	-	-
4.	BBI Hortikultura Sungai Tiga	16.000	16.150	100,9	16.000	16.200	101,5	100,3
5.	BBI Kentang Kayu Aro	20.000	20.000	100	25.000	25.020	100,0	125,1
6.	BBU Kentang Jangkat	20.000	20.000	100	20.000	48.000	240,0	240,0
7.	Taman Anggrek	4.000	5.500	137,5	8.000	61.970	774,6	1126,7
Jumlah		161.000	165.056	102,5	161.000	165.056	102,5	300,06

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi



Kondisi ini telah meningkatkan PDRB dari sektor pertanian sebesar 29,4% pada tahun 2012, dibanding kontribusi yang diberikan pada tahun 2011 yakni sebesar 28,0%.

Tabel 3.44.
Perbandingan Capaian Kinerja Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	27,9	28	29	29,4	101

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

3.2.3.3.2. Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)

Salah satu indikator yang dipergunakan untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai tukar petani (NTP) rata-rata Bulan Januari hingga Desember 2012, Sub Sektor Tanaman Pangan adalah 90,01 dan NTP rata-rata Sub Sektor Hortikultura adalah 88,89 dengan total nilai kedua komponen tersebut adalah 89,45. Perkembangan NTP tahun 2012 selengkapnya dapat dilihat ada tabel berikut ini :

Tabel 3.45 Nilai Tukar Petani Tahun 2012

No.	Bulan	Nilai Tukar Petani (NTP)	
		Sub sektor Tanaman Pangan	Subsektor Hortikultura
1.	Januari	93,51	91,69
2.	Februari	91,69	90,72
3.	Maret	91,20	89,32
4.	April	90,13	88,49
5.	Mei	89,72	88,25
6.	Juni	89,87	88,64
7.	Juli	89,29	88,39
8.	Agustus	88,72	89,06
9.	September	88,82	88,20
10.	Oktober	89,27	88,30
11.	November	89,04	87,55
12.	Desember	88,91	88,07
Rata-rata		90,01	88,89

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi

Menyikapi rendahnya NTP Provinsi Jambi pada tahun 2012, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebabnya, yaitu :

- a. Indeks harga yang dibayarkan oleh petani (baik untuk keperluan rumah tangga petani ataupun untuk keperluan produksi pertanian) peningkatannya lebih cepat daripada indeks harga yang diterima petani, sehingga kemampuan nilai tukar petani menjadi lebih rendah.



- b. Terjadi transformasi pola konsumsi petani yang cenderung mengikuti pola konsumsi masyarakat perkotaan, dimana lebih banyak mengkonsumsi barang-barang yang sifatnya tidak produktif.
- c. Kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah terbesar ada pada kegiatan pengadaan dan perdagangan saprota, alsintan, serta kegiatan pengolahan hasil dan perdagangan produk (*off-farm* dalam sistem agribisnis) yang jatuh pada mereka yang bukan petani, akibatnya nilai tambah yang dinikmati petani tetap kecil, sementara mereka yang berada pada ekonomi non-usaha tani menikmati nilai tambah yang besar.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan langkah-langkah strategis, antara lain :

1. Mengurangi beban belanja konsumsi rumah tangga petani dengan memberdayakan atau memanfaatkan pekarangan rumah untuk pengembangan tanaman pangan seperti cabe, sayur-sayuran, ikan, dll,
2. Meningkatkan peran Koperasi Agribisnis yang bergerak di tiga sub sektor: hulu, kegiatan usahatani dan hilir, serta menangani satu aliran produk sebagai bisnis inti (*core business*) sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayah kabupaten/lokalita. Dengan demikian, pengembangan suatu komoditas mulai dari hulu sampai hilir dapat dilakukan,
3. Memperbaiki jalur distribusi/transportasi dari sentra produksi ke pasar,
4. Membangun gudang atau *Supply Base* untuk hasil pertanian yang mudah rusak,
5. Memperbaiki tata niaga produk pertanian, dan
6. Membangun industri hilir untuk barang jadi atau barang setengah jadi beserta kegiatan perdagangannya sehingga nilai tambah produk dapat dikuasai oleh petani.

Tabel 3.46.
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Nilai Tukar
Petani (NTP) Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Nilai Tukar Petani	96	96,01	98	89,45	91,28

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012



3.2.3.3.3. Indikator Kinerja Ketersediaan Energi/kap/perhari, dan Pola Pangan Harapan

Dalam melaksanakan program peningkatan ketahanan pangan, tidak terlepas dari 4 (empat) aspek ketahanan pangan yakni : (1). Aspek ketersediaan dan kerawanan pangan; (2). Aspek distribusi dan harga pangan; (3). Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan (4). Aspek Manajemen Ketahanan Pangan. Kegiatan yang telah dilaksanakan dari keempat aspek tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.47. Ketersediaan Energi

Aspek ketersediaan dan Kerawanan Pangan, hasil yang telah dicapai antara lain : Ketersediaan Energi Tahun 2011 dan 2012 berdasarkan Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi Tahun 2011, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita sebesar 3.409 Kkal/Kap/Hari, dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ditingkat ketersediaan sebesar 89,64 hal ini telah melebihi kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.200 Kkal/Kap/Hari, sedangkan perkiraan ketersediaan energi Tahun 2012 sebesar 3.425 Kkal/Kap/Hari, dengan skor PPH tingkat ketersediaan sebesar 89,90.

No	Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan Energi		Ketersediaan Ideal
		(Kkal/Kap/Hari)		(Kkal/Kap/Hari)
		2011	2012*	
1.	Padi – Padian	1721	1.729	1.100
2.	Umbi – Umbian	212	218	132
3.	Pangan Hewani	150	154	264
4.	Minyak Dan Lemak	770	770	220
5.	Buah Biji/Berminyak	181	181	66
6.	Kacang – Kacangan	111	112	110
7.	Gula	132	132	110
8.	Sayuran dan Buah	132	133	132
9.	Lain – Lain	-	-	66
	Jumlah	3.409	3.425	2.200

Ket : * Tahun 2012 angka perkiraan
Data : BKP Provinsi Jambi

Dari tabel diatas dapat dilihat Skor PPH di Tingkat Ketersediaan, energi dari kelompok pangan hewani masih kurang, sedangkan kelompok pangan lainnya telah melebihi standar kecukupan ditingkat ketersediaan.

Ketersediaan Pangan dari Kemampuan Produksi adalah ketersediaan pangan untuk dikonsumsi masyarakat yang berasal dari produksi lokal yang merupakan selisih dari produksi daerah dikurangi dengan kebutuhan benih (khusus padi dan palawija), tercecce dan pakan. Ketersediaan pangan dari, kemampuan produksi daerah, konsumsi penduduk Jambi melebihi kebutuhan berdasarkan Pola Pangan Harapan yang mengacu kepada AKG di Tingkat Konsumsi 2.000 Kkal/Kap/Hari, oleh karena itu jika dilihat dari jumlah yang telah dikonsumsi penduduk, ketersediaan bahan pangan dari produksi dari 10 jenis komoditi pangan hanya 3 komoditi yang ketersediaan dari kemampuan produksi



belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi yaitu kedelai, kacang hijau, dan telur, namun demikian ketersediaan dipasar dapat terpenuhi dari pasokan luar daerah.

Tabel 3.48.
Skor Pola Konsumsi Pangan Harapan Aktual

No	Kelompok Pangan	Gram/ Kap/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								
			Kalori	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Gap skor AKE dan Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	275,9	1042	54,7	52,1	0,5	27,4	26,1	25,0	1,1	25,0
2	Umbi-umbian	91,7	95	5,0	4,8	0,5	2,5	2,4	2,5	-0,1	2,4
3	Pangan Hewani	119,8	204	10,7	10,2	2,0	21,4	20,4	24,0	-3,6	20,4
4	Minyak dan Lemak	30,4	272	14,3	13,6	0,5	7,1	6,8	5,0	1,8	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	6,8	37	1,9	1,8	0,5	1,0	0,9	1,0	-0,1	0,9
6	Kacang-kacangan	13,3	39	2,0	1,9	2,0	4,1	3,9	10,0	-6,1	3,9
7	Gula	30,0	106	5,6	5,3	0,5	2,8	2,7	2,5	0,2	2,5
8	Sayur dan Buah	202,2	83	4,3	4,1	5,0	21,7	20,7	30,0	-9,3	20,7
9	Lain-lain	67,0	27	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total			1.904	100,0	95,2		88,0	83,8	100,0		80,7

Keterangan =

*) Angka Kecukupan Energi
(AKE) =

2.000

Kkal/Kap/Hari

*) Sumber Data := BPS Pusat

Dari tabel nampak bahwa Pola Konsumsi Masyarakat Jambi belum memenuhi Pola Pangan Harapan (PPH). Konsumsi pangan masih didominasi oleh padi-padian namun kekurangan umbi-umbian dan pangan hewani, padahal sumber karbohidrat juga berasal dari umbi-umbian. Konsumsi pangan umbi-umbian masyarakat Jambi masih rendah yaitu 5% dari AKE bila dibandingkan dengan PPH sebesar 6% dari AKE.

Namun yang perlu diwaspadai adalah konsumsi pangan sumber lemak + minyak dan gula sudah berlebih. Kelebihan dari kedua pangan ini akan membawa dampak negatif bagi kesehatan terutama penyakit degeneratif seperti tekanan darah tinggi, jantung dan diabetes.

Konsumsi energi masyarakat Jambi sebesar 1.904 kkal/kap/hr atau telah mencapai 95,2 % dari kecukupan gizi yang dianjurkan yakni sebesar 2.000 kkal/kap/hr. Kontribusi energi terbesar bersumber dari kelompok padi-padian sebesar 1.042 kkal/kap/hr (54,7%). Padahal sesuai Pola Pangan Harapan (PPH) kontribusi energi dari padi-padian sebesar 1.000 kkal/kap/hr atau 50% dari total energi sebesar 2.000 kkal/kap/hr, sisanya (50%) bersumber dari kelompok pangan



lainnya (umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta pangan tambahan lainnya).

Upaya yang dilakukan dalam memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat adalah dengan melakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung upaya tersebut adalah meningkatkan kemampuan ibu-ibu mengolah pangan yang baik dan aman, pemanfaatan lahan pekarangan dan pengembangan pangan alternatif beras dari sumber karbohidrat tepung-tepungan. Bila kegiatan-kegiatan ini berjalan dengan baik maka diharapkan pada tahun 2015 pola pangan masyarakat Jambi telah mendekati Pola Pangan Harapan.

Tabel 3.49.
Perbandingan Capaian Kinerja Ketersediaan Energi/kap/hari, dan Pola Pangan Harapan Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Ketersediaan energi/kap/hari PPH	3.409 Kkal/Kap/Hr	3.409 Kkal/Kap/Hr	3.250 Kkal/Kap/Hr	3.425 Kkal/Kap/Hr	105

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

3.2.4. Analisis Capaian Kinerja Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu Yang Optimal Dengan Mengedepankan Penataan Ruang dan Lingkungan

Tabel 3.50.
Pengukuran Kinerja Misi 4 : Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu Yang Optimal Dengan Mengedepankan Penataan Ruang dan Lingkungan

No.	Sasaran	Indikator	Kondisi awal RPJMD	Target Tahun 2012	Realisasi Tahun 2012	% Capaian
1.	Terwujudnya Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya Air, Lahan, dan Tambang Air	– Penurunan titik api (hot spot)	1.782 titik	2000 titik	2.414 titik	120
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan	– % Luasan lahan tertutup pohon	64,80	64,80	64,80	100



Mitigasi Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan Hidup	– Penurunan emisi gas rumah kaca	Mt CO2	17,25Mt CO2	17,25Mt CO2	100
	– Rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca	0 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	100

3.2.4.1. Sasaran Terwujudnya Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya Air, Lahan dan Tambang

3.2.4.1.1. Indikator Kinerja Penurunan Titik Api (Hot Spot)

Dalam rangka mencegah serta menanggulangi terjadinya kebakaran hutan, maka Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan yang salah satu kegiatannya adalah pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dalam kegiatan ini dilakukan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang telah terlaksana di 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi, pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tebo, Merangin, Bungo, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.

Pada tahun 2012, di saat musim kemarau tercatat Jumlah titik api yang terpantau NOAA yakni sebanyak 550 titik, namun pada kenyataannya jumlah titik api yang terpantau yakni lebih dari 2000 titik, dan sebanyak 2.414 titik telah berhasil diatasi. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tersebut antara lain dengan melakukan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Serta Kegiatan Penyuluhan Kehutanan. Kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan dan membentuk pola pikir masyarakat agar ikut berperan serta dalam menjaga kelestarian hutan dalam pemanfaatannya. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di 9 Kabupaten se Provinsi Jambi.

Tabel 3.51.
Perbandingan Capaian Kinerja Penurunan Jumlah Titik Api
Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Penurunan jumlah titik api	1500	2000	2000	2.414	120

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012



3.2.4.2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Mitigasi Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan Hidup

3.2.4.2.1. Indikator Kinerja Rasio Luasan Lahan Tertutup Pohon

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan sebagaimana Luas Kawasan Hutan Tetap di Provinsi Jambi berdasarkan SK Menhutbun RI No.421/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 (cq. PERDA RTRW Provinsi Jambi No. 9 Tahun 1993 tanggal 27 Desember 1993) adalah seluas 2.179.440 Ha (42,73% Luas Daratan Jambi) dengan rincian :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Hutan Produksi Terbatas | : 340.700,00 Ha (15,63%) |
| b. Hutan Produksi Tetap | : 971.490,00 Ha (44,57%) |
| c. Hutan Lindung | : 191.130,00 Ha (8,77%) |
| d. Hutan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam : | |
| ✚ Cagar Alam | : 30.400,00 Ha (1,39 %) |
| ✚ Taman Nasional | : 608.630,00 Ha (27,92 %) |
| ✚ Tahura | : 36.660,00 Ha (1,68 %) |
| ✚ Hutan Wisata Alam | : 430,00 Ha (0,02 %) |

Rasio luas kawasan tertutup berdasarkan kondisi saat ini di provinsi Jambi sebesar 64,80% persen (Dinas Kehutanan, 2012); telah diatas nasional yang hanya 52,43%, target ini akan terus meningkat dengan upaya-upaya penanaman satu milyar pohon (one Biliun Indonesia Tree). Kegiatan ini akan dilakukan oleh pemegang izin HTI, Pemegang izin HTR, Pemegang izin Perusahaan perkebunan, Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota. Pohon yang akan ditanam adalah sebanyak 56.634.327 batang dengan jarak tanam rata-rata 4x5 meter setara dengan luas 113.268,65 Hektar. Kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan target kawasan tertutup pohon pada tahun 2015 dalam pencapaian target MDGs.

Kawasan hutan Provinsi Jambi meliputi luas $\pm$ 2.179.440,00 Ha atau 42,73% dari keseluruhan luas Provinsi Jambi. Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan di Provinsi Jambi pada tahun 2010 mencapai 46%, yang terdiri dari Kawasan Konservasi seluas 676.120 Ha, Kawasan Lindung seluas 191.130 Ha dan Kawasan lindung Gambut seluas 253.330 Ha. Luasan kawasan lindung ini jauh diatas nasional yang hanya 26,40 pada tahun 2009, tahun 2015 ditargetkan luasan ini terus meningkat.

Di tingkat nasional, rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial ini persentasenya sebesar 4,35 persen (Kementerian Kelautan,2009). Provinsi Jambi mempunyai 10% kawasan lindung perairan,



sehingga saat ini status provinsi Jambi telah mencapai target MDGs tahun 2015 yaitu sebesar 10%. Untuk proposi tangkapan ikan yang berada pada batasan biologis aman di provinsi Jambi sebesar 71.820 ton/tahun sehingga status Jambi saat ini masih dibatas Maximum Sustainable Yield (MSY) yang ditentukan.

Capaian tersebut di atas tentunya tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam berbagai macam program dan kegiatan yang saling terkait, diantaranya :

Melalui Program pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan yang bertujuan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, difokuskan dalam dua kegiatan yakni kegiatan Inventarisasi Potensi Hutan yang telah dilakukan inventarisasi potensi pada 8 kabupaten, serta kegiatan Restrukturisasi Industri Kehutanan, Optimalisasi PNPB dari SDA sektor kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah melalui revitalisasi industri kehutanan dengan bahan baku yang legal dan berkelanjutan, serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor kehutanan. Kegiatan ini dilakukan pada 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan didukung oleh 9 kegiatan dengan hasil yang telah dicapai yakni terlaksananya kegiatan penanaman 1 Milyar Pohon, danelihara pohon tingkat Provinsi Jambi serta pemeliharaan atas tanaman unggulan lokal dan tanaman OBIT yang telah tertanam pada tahun sebelumnya. Terlaksananya pemeliharaan tanaman di 2 Demplot HTR. Terlaksananya Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 147,75 Ha. Terbentuknya Hutan Desa (HD) sebanyak 24 unit yang berada di 3 Kabupaten (Merangin, Bungo, Batanghari) dengan total luas 54 ribu Ha. Terlaksananya orientasi batas sesuai target yaitu 35,1 km dan sosialisasi tata batas di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjaung Jabung Barat (6 kecamatan). Terjaganya kawasan hutan dari perambahan dan terselesaikannya 5 kasus tindak pidana kehutanan. Terwujudnya konsep perubahan substansi kehutanan dalam tata ruang Provinsi Jambi yang telah melewati tahap uji konsistensi dari stakeholder dengan proses yang masih akan berlanjut di Tahun Anggaran 2013 mendatang.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan memiliki satu kegiatan pendukung yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Pada Tahun Anggaran 2012 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melalui anggaran APBD dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Kementerian Kehutanan RI telah melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (KBR) Kebun Bibit Rakyat sebanyak 11 (sebelas) Juta Pohon dan melaksanakan pendistribusian Bibit Tanaman Kehutanan sebanyak 64 ribu batang.



Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. dituangkan dalam berbagai kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dalam kegiatan ini dilakukan patrol pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang telah terlaksana di 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi, pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tebo, Merangin, Bungo, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.
- b. Kegiatan Pembangunan Tanaman Hutan Kenali dan Kebun Raya Bukit Sari. Dalam kegiatan ini telah dilaksanakan Gerakan 1 Pohon 1 PNS dengan jumlah bibit tanaman kehutanan yang telah didistribusikan sebanyak 19 ribu batang dan terlaksananya pembangunan-pembangunan fisik di Taman Hutan Kenali dan Kebun Raya Bukit Sari sehingga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atas Retribusi dan Taman Hutan Kenali selain nilai jasa lingkungannya, serta dapat terjaganya Kebun Raya Bukit Sari dari Perambahan dan menambah kontribusinya dalam ilmu Pengetahuan.
- c. Kegiatan Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan Dalam kegiatan ini telah dilakukan patroli pengamanan hutan dari perambahan di 8 Kabupaten di Provinsi Jambi, Koordinasi pengamanan hutan di 9 Kabupaten serta pemberangkas 15 perkara pidana kehutanan.
- d. Kegiatan Penyuluhan Kehutanan yang bertujuan untuk membuka wawasan dan membentuk pola pikir masyarakat agar ikut berperan serta dalam menjaga kelestarian hutan dalam pemanfaatannya. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di 9 Kabupaten se Provinsi Jambi.
- e. Kegiatan Pengawasan dan Monitoring HPH/HPHTI, Dalam kegiatan ini dilakukan monitoring atas aktivitas pemanfaatan lahan hutan pada HTI sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- f. Kegiatan Pengelolaan Tahura Sekitar Tanjung (DAK) Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga Tahura Sekitar Tanjung dari perambahan dan terkelolanya Tahura sesuai fungsinya. Untuk menunjang tercapainya tujuan kegiatan ini telah diadakan sarana dan prasarana pengamanan dan sosialisasi, dilakukannya rehabilitasi hutan dan lahan seluas 40 ha.

Tabel 3.52.
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Rasio Luasan Lahan Tertutup Pohon Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Luasan lahan tertutup pohon	64,80% (2.179.440 Ha)	64,80% (2.179.440 Ha)	64,80% (2.179.440 Ha)	64,80% (2.179.440 Ha)	100

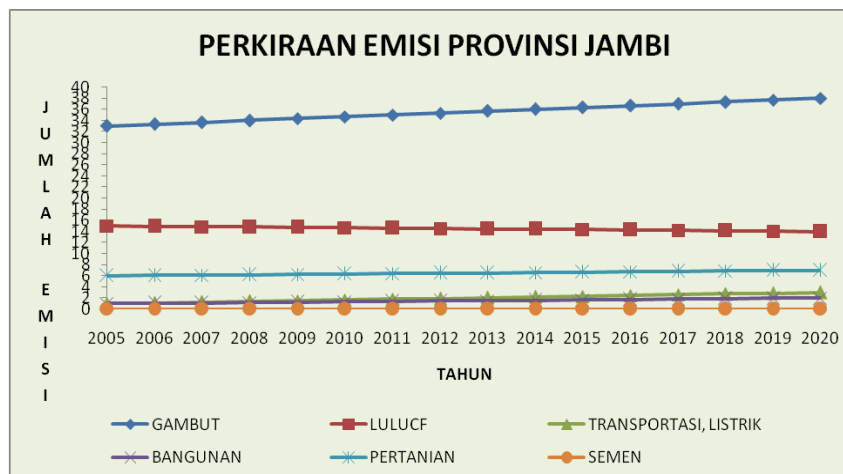
Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012



3.2.4.2.2. Indikator Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Berdasarkan perhitungan dan analisis Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) 2010 terhadap pertumbuhan emisi dan mitigasi bahwa dalam skenario bisnis seperti biasa/business As Usual, Provinsi Jambi akan menjadi kontributor emisi gas rumah kaca yang signifikan di Indonesia sampai tahun 2030. Selanjutnya diterangkan Emisi bersih GRK tahunan Jambi pada tahun 2005 diperkirakan mencapai 57 MtCO₂e¹— setara dengan sekitar 3 persen dari total emisi Indonesia. Gambut dan Land Use and Land Use Change Forest (LULUCF) sejauh ini adalah kontributor emisi terbesar terhadap emisi Provinsi Jambi, mewakili 85 persen dari total emisi provinsi, Apabila tidak terdapat perubahan dalam cara pengelolaan sektor-sektor beremisi tinggi, emisi netto Jambi diperkirakan akan meningkat hingga 30 persen antara tahun 2005 dan 2030 dari 57 Mt CO₂e menjadi 74 MtCO₂e.

Grafik 3.7.
Perkiraan Emisi GRK Provinsi Jambi



Pro Environment merupakan salah satu Strategi pembangunan Provinsi Jambi, untuk itu dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010-2015 mempunyai Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 69 Mt CO₂ hingga tahun 2030 atau 17,25 Mt CO₂ selama 5 tahun (yaitu 53% dari lahan gambut dan 36 % dari kehutanan). Sedangkan menurut Perhitungan yang dilakukan oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim, Jambi memiliki potensi untuk menurunkan emisi GRKnya sampai dengan 55 MtCO₂e hingga tahun 2030, dengan perpaduan yang tepat antara kebijakan dalam negeri dan dukungan internasional. Dari kemungkinan-kemungkinan penurunan ini, 48 persen datang dari upaya upaya terkait konservasi lahan gambut dan 38 persen berasal dari sektor LULUCF. mewakili 80 persen total potensi pengurangan Jambi :

- (1) Mencegah pembakaran hutan dan lahan gambut;



- (2) Mengurangi deforestasi hutan melalui penggunaan lahan yang lebih efektif, kebijakan-kebijakan alokasi lahan dan dengan meningkatkan produktivitas pertanian;
- (3) Merehabilitasi lahan gambut yang tidak digunakan atau yang rusak;
- (4) Mengelola hutan secara lestari; dan
- (5) Melakukan reboisasi.

Beberapa Program yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi emisi karbon di Provinsi Jambi adalah :

- 1) Natural Resource Management, diantaranya pembenahan tata ruang dan rehabilitasi lahan, dalam hal ini Provinsi Jambi saat ini sedang melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),
- 2) Renewable Energy: Hydro power, Solar cell dan biomass,
- 3) Capacity and Human Resource Management : UMKM, Koperasi desa, capacity building, pengembangan sekolah kejuruan green dan riset.

Selain upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan Pergub Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca yang bertujuan untuk memberi panduan kepada Pemerintah Provinsi Jambi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dalam pelaksanaan pembangunan rendah karbon sehingga konsistensi pelaksanaannya menjadi terukur dan terarah serta mampu mendukung konsistensi pembangunan rendah karbon secara nasional.

3.2.5. Analisis Capaian Kinerja Misi 5 : Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum Serta Kesetaraan Gender

Tabel 3.53.

Pengukuran Kinerja Misi 5 : Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum Serta Kesetaraan Gender

No.	Sasaran	Indikator	Kondisi awal RPJMD	Target Tahun 2012	Realisasi Tahun 2012	% Capaian
1.	Terciptanya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang baik, bersih, efisien,	– Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WDP	WDP	WDP	100
		– Pembinaan & Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi	4	6 OPD	8 OPD	120
		– Persentase kepatuhan	20	100	26,1	26



efektif, transparan, profesional dan akuntabel	penyampaian LHKPN	45	75	62	82,6
	– Persentase temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi KKN				
	– Penyusunan dan Penerapan SK SOP Biro	0 SK SOP	9 SK SOP	9 SK SOP	100
	– Pemanfaatan Aplikasi & Penerapan E-Government	10	14	14	100
	– Sentralisasi perizinan yang terpadu	0	100	186	186
2. Terwujudnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum	– Kajian dan produk hukum yang mendukung kebijakan pembangunan daerah				
	- Perda	9	10	13	130
	- Pergub	37	20	55	275
	– Persentase penyuluhan hukum kepada masyarakat	36	36 (4 Kab/Kota)	36 (4 Kab/Kota)	100
	– Persentase kasus yang diberikan bantuan hukum, dan konsultasi hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan	15	20	20	100
3. Meningkatnya Peranan Perempuan dalam pembangunan	– Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG)	64	63,26	63,26	100
	– Persentase partisipasi angkatan kerja wanita	35	47	47	100
	– Persentase wanita yang menjabat di pemerintahan	24,47 (245 orang)	26 (260 orang)	26,27 (263 orang)	101

3.2.5.1. Sasaran Terciptanya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efisien, Efektif, Transparan, Profesional, dan Akuntabel.

3.2.5.1.1. Indikator Kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah

Target kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Provinsi tahun 2012 dengan predikat WDP masih mengacu pada target kinerja tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan penilaian pemeriksaan oleh BPK RI baru akan dilakukan pada awal tahun 2013 ini. Namun berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan opini baik BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi diantaranya adalah penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan APBD-P, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta pelaksanaan sosialisasi dan bimtek regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.



Selain upaya tersebut di atas, pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Itjen Kemendagri, Itjen Teknis dan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2012 juga merupakan salah satu faktor pendukung opini BPK terhadap akuntabilitas keuangan SKPD Provinsi Jambi.

Terhadap Kegiatan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan BPK Provinsi Jambi yang dituangkan dalam rekomendasi terhadap temuan telah diupayakan tindak lanjutnya dengan tujuan untuk memperoleh status hasil pemeriksaan. Adapun dari Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi Jambi periode tahun 2012 terdapat 266 temuan dengan 524 rekomendasi. Dan rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 344 atau 65,7 % dan masih dalam proses ditindaklanjuti sebanyak 78 rekomendasi dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 102 rekomendasi atau 19,47 %. Adapun terhadap rekomendasi yang masih dalam proses adalah merupakan rekomendasi terhadap Hasil Pemeriksaan yang baru dilaksanakan pada tahun 2012.

Tabel 3.54.
Perbandingan Capaian Kinerja Opini BPK Terhadap
Laporan Keuangan Daerah Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WDP	WDP	WDP	WDP	100

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

3.2.5.1.2. Indikator Kinerja Pembinaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi & Evaluasi UPTDB/D

Dalam rangka efisiensi kelembagaan pemerintah Provinsi Jambi dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pada Tahun 2012, dilaksanakan kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Pada tahun 2012, target kinerja pembinaan OPD Provinsi Jambi ditargetkan sebanyak 6 OPD, namun pada pelaksanaannya, pembinaan yang dilakukan sebanyak 8 OPD, sedangkan evaluasi UPTDB/D Provinsi Jambi ditargetkan 4 UPTD/B dan telah terealisasi sesuai target.

Berkaitan dengan pembinaan OPD tersebut, terdapat kinerja kegiatan yang telah direncanakan namun urung dilaksanakan yakni sosialisasi perundang-



undangan bidang kelembagaan. Hal ini disebabkan karena belum ada penetapan tentang RPP 41 tahun 2007 dari pemerintah pusat sehingga sosialisasi terhadap perubahan peraturan pemerintah tersebut belum dapat dilaksanakan. Dengan dibinanya OPD Provinsi Jambi tersebut telah meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta kemampuan kinerja lembaga dan aparatur yang berprinsip *right sizing*.

Tabel 3.55.
Perbandingan Capaian Kinerja Pembinaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) & Evaluasi UPTD/B Provinsi Jambi Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Jumlah OPD yang dibina	4	4	6	8	133
2.	Jumlah UPTD/B yang di evaluasi	4	4	4	4	100

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

3.2.5.1.3. Indikator Kinerja Persentase Kepatuhan Terhadap Penyampaian LHKPN

Dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik sebagai upaya pencegahan korupsi serta menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari KKN, serta Surat Edaran KemenPAN & Reformasi Birokrasi RI Nomor. SE/05/M.PAN/4/2006 tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), maka salah satu indikator dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik adalah kepatuhan penyampaian LHKPN bagi pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Jambi.

Persentase kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN pada tahun 2012 mencapai 20% dari total pejabat Pemerintah Provinsi Jambi yang harus menyampaikan LHKPN yakni sebanyak 60 orang. Capaian ini belum mencapai hasil yang maksimal karena seharusnya pelaporan LHKPN dapat terealisasi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, pejabat yang telah menyampaikan LHKPN sebanyak 20 orang atau sebesar 33,3%. Berikut digambarkan perbandingan persentase kepatuhan pejabat Provinsi Jambi yang menyampaikan LHKPN.



Tabel 3.56.
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kepatuhan Terhadap
Penyampaian LHKPN Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN	20	33	100	20	20

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

3.2.5.1.4. Indikator Kinerja Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Yang Berindikasi KKN

Dalam rangka meningkatkan Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi yang ditandai dengan kondisi ini penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ditempuh dengan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dengan sasaran outcome adalah Terwujudnya peningkatan kinerja Dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Tabel 3.57.
Perbandingan Capaian Kinerja Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan
Yang Berindikasi KKN Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi KKN	45	43	40	45	88

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

Secara Teknis sasaran pemeriksaan pada tahun 2012 dilakukan dengan berpedoman kepada Program Kerja Pengawasan Tahun 2012 yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 70/Kep. Gub/INSPEKTORAT/2012.

Pada tahun 2011, dari pemeriksaan reguler diperoleh hasil berupa tersusunnya laporan hasil pemeriksaan sebagai indikator kinerja *output* sebanyak 43 buah LHP (per periode pelaporan bulan Desember 2011). Pada tahun 2012, Terhadap kegiatan ini telah ditetapkan indikator sasaran berupa objek



pemeriksaan lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Rencana tingkat capaian sasaran berdasarkan indikator tersebut adalah 45 Pemeriksaan Reguler Provinsi dan 11 Pemeriksaan *Khusus untuk Pemeriksaan di Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jambi pada Tahun 2012 di fokuskan pada Program Kupem dan Samisake*, ditambah dengan Pemeriksaan Serentak (Stok Kas Opname), Review Laporan Keuangan dan Evaluasi LAKIP dan Evaluasi LPPD serta Monitoring Samisake yang keseluruhannya adalah 56 objek pemeriksaan.

3.2.5.1.5. Indikator Kinerja Persentase Penyusunan dan Pelaksanaan SOP SKPD

Dalam rangka Koordinasi/pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di Provinsi Jambi, di tahun 2012 telah dilaksanakan pendokumentasian tupoksi seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam bentuk SOP yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur pada masing-masing Biro yakni sebanyak 9 (sembilan) Keputusan Gubernur. Sedangkan pada tahun 2013 akan diinisiasi penyusunan SOP seluruh SKPD Provinsi Jambi.

Tabel 3.58.
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penyusunan dan Penerapan SOP Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Penyusunan dan pelaksanaan SOP Biro lingkup Setda	0	0	9 SK (SOP Biro)	9 SK (SOP Biro)	100

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

Dengan didokumentasikannya SOP Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi ini telah menjadikan pola kerja staf dan pejabat teknis menjadi lebih terarah dan mengetahui prosedur kerja masing-masing berdasarkan jabaran tupoksinya yang pada akhirnya nanti akan berhubungan erat dengan penilaian sasaran kinerja pegawai.

3.2.5.1.6. Indikator Kinerja Pemanfaatan Aplikasi dan Penerapan E-Government

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran kemudahan data serta akses yang lancar di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi meliputi SKPD dan Setda. Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi telah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk kebutuhan informasi bagi masyarakat maupun SKPD atau pimpinan. Sarana dan prasarana dimaksud adalah jaringan



terkoneksi antar SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi berupa jaringan internet maupun intranet.

Capaian indikator keberhasilan didapat dengan cara melakukan pemantauan/ pengecekan terhadap pelaksanaan pemanfaatan akses jaringan internet/intranet melalui pemantauan langsung ataupun tidak langsung ke SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Jadi keberhasilan dari sasaran ini tidak hanya ditentukan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi sendiri namun merupakan hasil kerjasama dengan SKPD sebagai pemanfaat jaringan internet/intranet.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah pemasangan jaringan internet/intranet di setiap SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 45 SKPD dan untuk mengoptimalkan jaringan agar dapat mengakses internet/intranet, telah dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyedia bandwidth sebesar 10 Mbps. Akses jaringan ini dikembangkan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik ke SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi selama kurun waktu 2012. Pengembangan akses tersebut adalah jaringan e-office SKPD, jaringan absensi online di SKPD yang masih dalam tahap pengembangan.

Sampai saat ini, pengembangan aplikasi yang telah ada dan telah diterapkan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Kepegawaian & Penggajian
2. Sistem Informasi Koperasi
3. Sistem Informasi Pemerintahan
4. Sistem Informasi Disperindag
5. Sistem Informasi ESDM
6. Sistem Informasi Pariwisata & Kebudayaan
7. Sistem Informasi Hukum
8. Sistem Informasi Perikanan
9. Sistem Informasi Perkebunan
10. Sistem Informasi Peternakan
11. Sistem Informasi Dispora
12. Sistem Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
13. Sistem Informasi Satu Atap
14. Sistem Aplikasi Situation Room



Tabel 3.59.
Perbandingan Capaian Kinerja Pemanfaatan Aplikasi dan Penerapan E-Government Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Pemanfaatan aplikasi E-Government	10	12	14	14	100

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

Penerapan E-Government di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi telah membawa efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemerintahan terhadap keseluruhan dimensi strategis yakni : dimensi kebijakan, dimensi kelembagaan, dimensi infrastruktur, dimensi aplikasi, dimensi perencanaan. Pelaksanaan dan penerapan E-Government di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi telah membawa dampak positif terhadap prestasi di kancah nasional yakni menjadi **Terbaik ke-7** Tingkat Nasional Tahun 2011 atas penilaian dari Tim Asesmen Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

3.2.5.1.7. Indikator Kinerja Sentralisasi dan Optimalisasi Perizinan Terpadu

Pelaksanaan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama serta Pelayanan Perizinan Terpadu bertujuan untuk menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif serta kemudahan dalam pelayanan perizinan sehingga terciptanya kemitraan dunia usaha, kemitraan antar usaha dalam rangka pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu di Provinsi Jambi.

Melihat perkembangan pelimpahan perizinan yang diserahkan ke Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.60.
Perbandingan Capaian Kinerja Sentralisasi dan Optimalisasi Perizinan Terpadu Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Sentralisasi & optimalisasi perizinan terpadu	0	41	100	186	186

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012



Pelaksanaan koordinasi Pembinaan Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi dilakukan dengan Inventarisasi Izin-izin yang dimiliki oleh Perusahaan (berupa SIUP, IUP, APIT, IMTA dan Izin-izin yang diberikan oleh Kab./Kota. Selama Tahun 2012 pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal sudah menerbitkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perizinan dan non-perizinan yang terdiri dari 18 (delapan belas) perizinan dan 57 (lima puluh tujuh) non-perizinan.

Pada tahun 2012 ini Provinsi Jambi melalui Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi telah berhasil menjadi Nominee Penyelenggara **PTSP Provinsi terbaik ke-4 Tahun 2012 se-Indonesia**. Dengan keberhasilan ini diharapkan kedepannya BPMD dan PPT Provinsi Jambi dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga meningkatkan minat masyarakat dan investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jambi.

3.2.5.2. Sasaran Terwujudnya Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

3.2.5.2.1. Indikator Kinerja Kajian dan Produk Hukum Yang Mendukung Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam rangka penguatan produk hukum daerah yang menunjang kebijakan pemerintah daerah, maka dilakukan kajian dan produk hukum yang mendukung kebijakan tersebut dengan melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya : Penyelenggaraan berbagai Forum Diskusi dan Konsultasi Publik menyusun Ranperda Provinsi, dan penyusunan Pergub di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Beberapa produk hukum yang dikaji tersebut antara lain :

- a. Jumlah naskah Rancangan Perda yang didiskusikan adalah 10 diskusi.
- b. Jumlah naskah Rancangan Perda yang dicetak 9 Rancangan Perda.
- c. Terbentuknya naskah Rancangan Perda yang akurat
Kegiatan ini menghasilkan 9 Ranperda, yaitu :
 - a. Ranperda tentang Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2012
 - b. Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2013
 - c. Ranperda tentang Sumbangan Pihak ketiga (SP-3)
 - d. Ranperda tentang APBD Tahun 2012
 - e. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014
 - f. Ranperda Tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas sisi Darat Bandara Sultan Thaha Jambi
 - g. Ranperda Revisi Peraturan Daerah Lembaga Adat Melayu (LAM).
 - h. Ranperda tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi

Selanjutnya, kajian perundang-undangan daerah yang telah dilakukan, diantaranya :



1. Penelitian/Kajian Draf Peraturan Gubernur
Indikator yang ditetapkan adalah Jumlah Peraturan Gubernur yang diteliti dan dikaji sebanyak 48 Pergub
2. Penelitian/Kajian Draf Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur
Indikator yang ditetapkan adalah :
 - a. Jumlah Keputusan Gubernur yang diteliti dan dikaji sebanyak 673 Kepgub
 - b. Terbentuknya Instruksi Gubernur sebanyak 6 Ingub

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dilakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan Instansi di luar Pemerintah Daerah dalam pemberian dan pelaksanaan Sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat yang bertujuan agar :

1. Tercapainya masyarakat dan aparatur yang taat hukum.
2. Menurunnya angka pelanggaran hukum
3. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara Pemda, Instansi diluar Pemda, pemerintah Kab/Kota dalam proses pemberian dan pelaksanaan penyuluhan hukum di 4 kabupaten.

Selanjutnya, untuk melihat perkembangan kajian produk hukum yang mendukung kebijakan pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.61.
Perbandingan Capaian Kinerja Kajian Produk Hukum Yang Mendukung Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Perda	9	11	10	13	130
2.	Pergub	37	60	20	55	275

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

3.2.5.2.2. Indikator Kinerja Persentase Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat

Sebagai upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka telah dilakukan peningkatan masyarakat yang diberikan layanan hukum, yakni Kegiatan Pengkajian dan Inventarisasi Kasus Pelanggaran HAM dengan Indikator yang ditetapkan :



- a. Terinventarisasinya dan terkajinya kasus pelanggaran HAM terdiri dari kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 12 kasus, kasus perdagangan anak sebanyak 8 kasus dan kasus Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 2 kasus.
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor kepada aparat penegak hukum akan adanya pelanggaran HAM.

Pada tahun 2012, penyuluhan hukum kepada masyarakat telah dilaksanakan pada 4 Kab/Kota dari 11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi. Penyuluhan rutin dilakukan setiap tahunnya dengan rata-rata 4 Kab/Kota pertahun. Ini berarti kurun waktu tahun 2012 jika dibandingkan dengan target yang sebaiknya dicapai yakni 11 Kab/Kota hanya mencapai 36% (4 Kab/Kota).

Tabel 3.62.
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penyuluhan Hukum
Kepada Masyarakat Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Persentase penyuluhan hukum	36	36	100	36	36

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

3.2.5.2.3. Indikator Kinerja Persentase Kasus Yang Diberikan Bantuan Hukum, dan Konsultasi Hukum Baik Di Dalam maupun Di Luar Pengadilan

Pemberian bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Terhadap Permasalahan dan Keluhan Hukum yang timbul dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Baik di dalam maupun di luar pengadilan dilakukan dengan berbagai upaya Semiloka Kegiatan Bantuan Hukum dengan indikator yakni :

- a. Terlaksananya kegiatan semiloka dengan tema “Pelaksanaan semiloka hukum bagi pejabat pemerintah daerah provinsi, kab/kota kita wujudkan pemerintahan yang good goverment” dengan peserta sebanyak 41 orang yang dilaksanakan pada tanggal 15 oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 oktober 2012 bertempat Hotel Golden Harvest Jambi.
- b. Terbentuk dan terciptanya aparatur yang handal dalam melaksanakan tugas dan taat hukum.

Dari kegiatan tersebut di atas berdampak pada terbantunya permasalahan dan keluhan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintah kepada aparatur serta terfasilitasinya penyelesaian permasalahan hukum dan keluhan yang menyangkut perkara hukum perdata sebanyak 5 kasus dan Perkara Tata



Usaha Negara sebanyak 11 kasus dan terselesaikannya pengkajian dan sengketa hukum : 16 MOU.

Tabel 3.63.
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Bantuan Hukum, Konsultasi Hukum Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Persentase bantuan hukum	15 (6 kasus)	15 (6 kasus)	20 (7 kasus)	20 (7 kasus)	100

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

3.2.5.3. Sasaran Meningkatnya Peranan Perempuan Dalam Pembangunan

3.2.5.3.1. Indikator Kinerja Persentase Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Salah satu indikator pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menurut MDGs adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Kelompok penduduk usia sekolah ini adalah kelompok penduduk usia produktif. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Jambi menunjukkan bahwa angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun di Provinsi Jambi pada tahun 2012 telah mencapai 73,54%. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2011 yakni sebesar 64,9%. Peningkatan angka melek huruf terjadi antara lain karena peningkatan partisipasi penduduk usia 15-24 tahun yang buta huruf untuk mengikuti program pendidikan keaksaraan dan pendidikan non formal serta meningkatnya proporsi siswa yang menamatkan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs.

Tujuan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan memiliki tiga indikator, yaitu rasio perempuan terhadap laki-laki ditingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi; Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian dan Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun. Rasio perempuan terhadap laki-laki tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi adalah angka hasil bagi APM laki-laki jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan APM perempuan pada jenjang pendidikan yang sama. Apabila hasil bagi 95% - 105% dapat disimpulkan masih dalam kategori kesetaraan gender. Terjadi ketimpangan gender apabila hasil bagi lebih besar dari 105% atau lebih kecil dari 95%.

Berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di berbagai bidang. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di SD/ MI dan SMP berturut-turut sebesar 99,34% dan 100% pada tahun 2012, dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada



kelompok usia 15 sampai 24 tahun telah mencapai 99,72 %. Dengan demikian, Jambi sudah secara efektif menuju (*on-track*) pencapaian kesetaraan gender yang terkait dengan pendidikan pada tahun 2015.

Tabel 3.64.
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Persentase kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (dilihat dari APM 15-24 Th)	64	64,9	73	73,54	100

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2012

Sementara itu, angka buta huruf perempuan dan laki-laki menunjukkan pola yang sama di semua kabupaten/kota, yaitu persentase perempuan masih lebih tinggi dibandingkan persentase laki-laki. Secara total, penduduk buta huruf di Kota Jambi adalah yang terendah, hanya 1,38 persen. Begitu pula ketimpangan antara perempuan dan laki-laki relatif lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Kondisi cukup memprihatinkan terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di mana persentase buta huruf masih relatif tinggi baik penduduk perempuan maupun laki-laki (10,92% dan 5,07%)

Program Pendidikan Sekolah Menengah, diarahkan dalam rangka upaya perluasan akses layanan dan meningkatkan mutu keluaran/lulusan melalui berbagai upaya antara lain pemberian bantuan operasional, penyediaan ruang kelas, peningkatan bakat dan prestasi siswa, baik umum (SMA) maupun kejuruan (SMK). Upaya peningkatan akses pendidikan, terutama bagi siswa miskin dari sisi ekonomi sangat ditentukan oleh kebijakan yang dirumuskan dengan baik dan dibangun dengan proses partisipatif.

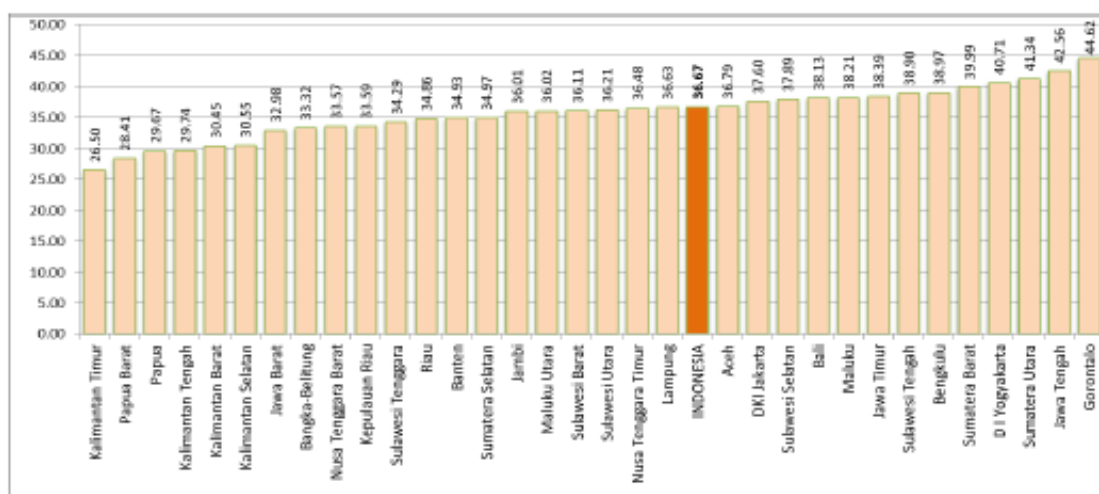
Dalam upaya peningkatan akses tersebut, pemerintah Propinsi Jambi menganut kebijakan yang berpihak pada siswa kurang mampu/miskin. Kebijakan yang berpihak kepada siswa miskin bertujuan untuk mengupayakan siswa miskin menikmati layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah tanpa terancam putus sekolah. Pada tahun 2012 telah dicanangkan kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU) oleh Mendikbud RI untuk memperluas kesempatan dan jangkauan partisipasi semua golongan untuk memperoleh layanan pendidikan. Dengan harapan satuan pendidikan pada jenjang menengah yang tersebar diwilayah Provinsi Jambi dapat melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan.



3.2.5.3.2. Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Wanita

Di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam rangka pencapaian target MDGs sebagai upaya meningkatkan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian telah meningkat dari 36,01 persen pada tahun 2011 (laporan MDGs 2011) seperti yang terlihat pada diagram berikut ini :

Diagram 3.6.
Partisipasi Angkatan Kerja Wanita (MDGs 2011)



Selanjutnya, dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dan perempuan, maka berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Melalui program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melaksanakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu, terbentuknya Institusi pemberdayaan perempuan di masing-masing Kab/Kota dalam Provinsi Jambi juga merupakan upaya juga berdampak pada penanganan pemberdayaan perempuan dan anak di masing-masing Kab/Kota.

3.2.5.3.3. Indikator Kinerja Persentase Wanita Yang Menjabat Eselon di Pemerintahan

Dalam era reformasi ini terbuka lebar bagi setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Langkah-langkah untuk merealisasikan hak perempuan ialah dengan menghapus adanya perbedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan misalkan: keharusan adanya perubahan pola pikir dan tingkah laku sosial budaya



terhadap perempuan, menghapuskan prasangka serta kebiasaan dan praktek yang bersifat diskriminatif.

Kewajiban Pemerintah untuk mengembangkan kebijaksanaan dan peraturan berkaitan dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai persamaan substantif, hak yang sama dan persamaan *legal standard* antara laki-laki dan perempuan (misalnya; hak yang sama dalam keluarga, peluang kerja yang sama, pemberian gaji yang sama, kewarisan, kewarganegaraan, kesempatan di bidang politik). Proses modernisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa dampak pada perubahan sosial pada peranan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Jumlah kaum perempuan yang bekerja di luar rumah seperti, sebagai Pegawai Negeri, di bidang Pemerintahan, Legislatif dan Yudikatif), semakin meningkat. Fenomena meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja memang diharapkan bahkan didorong oleh negara lewat konsep ke mitrasejajaran pria dan wanita dalam GBHN. Diharapkan perempuan akan lebih banyak berpartisipasi dalam pembangunan untuk peningkatan pemberdayaan perempuan tidak saja untuk masa kini tetapi juga untuk masa yang akan datang agar tetap berkesinambungan dalam pembangunan berkelanjutan.

Sebagai bentuk kesetaraan gender dan emansipasi wanita di pemerintahan, Pemerintah Provinsi Jambi selalu berusaha menghormati hak-hak wanita dalam pemerintahan termasuk didalamnya adalah memberikan kesempatan dalam berkarya di lingkungan pemerintahan. Perkembangan angka persentase wanita yang menjabat eselon merupakan salah satu indikator semakin proporsionalnya kesempatan yang di berikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Jika dilihat dari jumlah wanita yang menjabat eselon dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.65.
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Wanita Yang Menjabat Eselon di Pemerintahan Tahun 2010 s.d. 2012

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012		% Capaian
				Target	Capaian	
1.	Persentase Wanita yang menjabat eselon di Pemerintahan	24,47 (245 orang)	25,47 (255 orang)	26 (260 orang)	26,27 (263 orang)	100

Sumber : Data BKD & Hasil pengolahan data tahun 2012

Jika dilihat pada tabel 3.63, terlihat trend kenaikan persentase wanita yang menjabat eselon. Pada tahun 2010 tercatat sebanyak 245 orang atau sebesar 24,47% dari jumlah jabatan yang ada yakni sebanyak 1001 jabatan eselon (eselon 1 s.d eselon 4). Kenaikan persentase dialami pada tahun 2011 dengan tingkat persentase sebesar 25,47% dengan jumlah pejabat wanita sebanyak 255 orang, dan pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan sebesar 26,27% dengan



jumlah pejabat sebanyak 263 orang. Ke depan, diharapkan persentase ini akan terus meningkat menuju tingkat proporsional dalam mendukung kebijakan pemerintah mengenai emansipasi wanita dan kesetaraan gender. Dengan meningkatnya persentase ini, berdampak positif pada perencanaan anggaran responsif berbasis gender yang melahirkan program dan kegiatan-kegiatan yang berbasis gender, terutama program/kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

3.3.1. Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

Penyajian Laporan Realisasi APBD terdiri dari anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan beserta realisasinya, yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang APBD Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

3.3.2. Entitas Pengguna Anggaran

Untuk Tahun Anggaran 2012, entitas dalam Pemerintah Provinsi Jambi yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi seluruhnya berjumlah 33 SKPD, meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Inspektorat Provinsi, Badan, Dinas, Kantor, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

3.3.3. Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 dilakukan dengan



melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan pos-pos laporan keuangan, struktur APBD (pendapatan, belanja, dan pembiayaan), klasifikasi anggaran (pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta catatan atas laporan keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara mentrasir kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan pos-pos laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan konversi pos-pos laporan keuangan didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi dan khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, dimana dilakukan *reclass* untuk belanja pegawai, barang dan jasa, dan belanja modal.

3.3.4. Analisis Keuangan Kaitannya Dengan Pencapaian Kinerja

Dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya untuk melakukan optimalisasi pendapatan, baik dari PAD maupun dari sumber-sumber lainnya. Jika kita lihat pada tahun 2010, Pendapatan Daerah baru mencapai Rp.1,488 Triliun, meningkat menjadi Rp.1,749 Triliun pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp.2,766 Triliun.

Dari pendapatan tersebut dialokasikan untuk membiayai lima prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015 untuk Belanja Langsung, dimana untuk prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp.397,7 Milyar meningkat menjadi Rp.505,5 Milyar pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 mencapai Rp.697,9 Milyar.

Untuk prioritas pembangunan kedua, Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 259,5 Milyar di tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 310,2 Milyar di tahun 2011, dan meningkat menjadi Rp.393,3 Milyar di tahun 2012.

Untuk prioritas pembangunan ketiga, Pembangunan Ekonomi Rakyat, Investasi dan Kepariwisata pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 55,4 Milyar dan meningkat menjadi Rp.83,3 Milyar pada tahun 2012.

Sementara untuk prioritas pembangunan keempat, Ketahanan Pangan, SDA dan Lingkungan Hidup, pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp.32,5 Milyar meningkat menjadi Rp.46,2 Milyar pada tahun 2011 dan meningkat lagi menjadi Rp. 48,8 Milyar di tahun 2012.



Sedangkan untuk prioritas kelima, Penataan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik, juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2010 mencapai Rp. 148,9 Milyar, menjadi Rp.211,8 Milyar di tahun 2011, dan meningkat lagi menjadi Rp. 243,4 Milyar di tahun 2012.

Selanjutnya, disamping belanja Program prioritas diatas, Pendapatan tersebut juga dialokasikan untuk Belanja Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang tersebar di 46 SKPD.

Untuk mengetahui bagaimana realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2012 yang digunakan oleh SKPD provinsi Jambi sebagai entitas pengguna anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.66.
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Anggaran SKPD Provinsi Jambi Tahun 2012

NO	SKPD/INSTANSI	Total Anggaran			REALISASI DARI	SISA
		Anggaran	Anggaran	Total	TOTAL ANGGARAN	
	PENGGUNA ANGGARAN	Murni	Perubahan	Anggaran	KEUANGAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
	DINAS – DINAS			1,107,127,522,371	1,030,718,257,765	76,409,264,606
1	Dinas Budpar Provinsi Jambi	6,489,000,000	5,423,113,000	11,912,113,000	10,917,236,238	994,876,762
2	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi	8,808,995,000	360,819,960	9,169,814,960	8,095,491,206	1,074,323,754
3	Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	23,200,000,000	9,515,564,530	32,715,564,530	30,098,519,735	2,617,044,795
4	Dinas Pemuda & Olahraga Provinsi Jambi	21,680,000,000	3,315,003,100	24,995,003,100	24,102,389,696	892,613,404
5	Dinas ESDM Provinsi Jambi	2,159,892,000	1,020,755,500	3,180,647,500	2,878,763,619	301,883,881
6	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	#REF!	#REF!	28,109,351,290	26,414,357,407	1,694,993,883
7	Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Jambi	16,164,010,000	2,077,725,000	18,241,735,000	15,215,245,843	3,026,489,157
8	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	#REF!	#REF!	201,311,101,479	183,173,627,433	18,137,474,046
9	Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi	14,526,004,000	3,522,728,765	18,048,732,765	13,981,146,703	4,067,586,062
10	Dinas Peternakan & Kes. Hewan Prov. Jambi	9,880,000,000	1,905,709,500	11,785,709,500	11,010,104,707	775,604,793
11	Dinas Perindag Provinsi Jambi	7,158,000,000	903,910,100	8,061,910,100	7,556,039,329	505,870,771
12	Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	24,500,000,000	8,547,333,000	33,047,333,000	30,755,504,081	2,291,828,919
13	Dinas Pendapatan Provinsi Jambi	13,187,852,500	6,293,421,020	19,481,273,520	16,564,207,968	2,917,065,552
14	Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	9,598,010,000	1,021,804,400	10,619,814,400	9,312,928,311	1,306,886,089
15	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi	447,170,758,427	217,619,248,000	664,790,006,427	629,812,387,335	34,977,619,092
16	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi	10,657,411,800	1,000,000,000	11,657,411,800	10,830,308,154	827,103,646
	BADAN-BADAN	59,936,058,963	20,740,692,797	80,676,751,760	71,952,067,042	8,724,684,718
1	Bappeda Provinsi Jambi	10,259,700,000	7,092,122,850	17,351,822,850	15,769,163,088	1,582,659,762
2	Badan Penelitian & Pengembangan Prov. Jambi	4,150,000,000	586,660,570	4,736,660,570	4,492,954,705	243,705,865



3	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	4,288,813,000	1,262,145,350	5,550,958,350	5,304,735,237	246,223,113
4	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan	11,322,706,903	1,814,688,532	13,137,395,435	11,598,460,019	1,538,935,416
5	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	3,387,375,000	966,594,000	4,353,969,000	3,936,145,937	417,823,063
6	Badan Perpustakaan & Arsip Provinsi Jambi	3,430,720,400	493,535,000	3,924,255,400	3,622,282,291	301,973,109
7	Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Jambi	6,741,509,660	4,128,489,000	10,869,998,660	10,003,138,622	866,860,038
8	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi	4,096,946,100	2,208,776,800	6,305,722,900	4,005,430,085	2,300,292,815
9	Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	5,599,337,900	1,010,735,500	6,610,073,400	6,353,890,650	256,182,750
10	BPMD dan PPT Provinsi Jambi	2,850,565,000	884,893,400	3,735,458,400	3,357,670,918	377,787,482
11	Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi	3,808,385,000	292,051,795	4,100,436,795	3,508,195,490	592,241,305
	LEMBAGA TEKNIS LAINNYA	116,012,617,500	24,494,960,823	140,507,578,323	130,995,835,302	9,511,743,021
1	Kantor Penyiaran Independen Daerah Prov. Jambi	2,209,000,000	590,037,620	2,799,037,620	2,632,722,301	166,315,319
2	RS. Jiwa Daerah Provinsi Jambi	15,915,936,000	3,173,419,773	19,089,355,773	18,546,557,938	542,797,835
3	Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi	2,054,658,000	4,759,660,200	6,814,318,200	6,614,445,088	199,873,112
4	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	3,659,445,500	659,595,750	4,319,041,250	3,794,728,009	524,313,241
5	Inspektorat Provinsi Jambi	5,043,730,000	1,660,771,150	6,704,501,150	6,422,427,406	282,073,744
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	4,383,884,000	626,531,400	5,010,415,400	4,536,411,181	474,004,219
7	RS. Raden Mattahir Provinsi Jambi	72,445,964,000	11,736,990,065	84,182,954,065	78,238,864,164	5,944,089,901
8	Sekretariat KORPRI Prov. Jambi	1,500,000,000	212,157,820	1,712,157,820	1,372,557,559	339,600,261
9	Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi	8,800,000,000	1,075,797,045	9,875,797,045	8,837,121,656	1,038,675,389
	SEKRETARIAT	116,150,462,250	29,509,898,450	145,660,360,700	128,981,771,465	16,678,589,235
1	Sekretariat DPRD Provinsi Jambi	25,757,800,000	7,577,355,000	33,335,155,000	28,601,379,221	4,733,775,779
2	Sekretariat Daerah	90,392,662,250	21,932,543,450	112,325,205,700	100,380,392,244	11,944,813,456
1	Biro Hukum	2,415,350,000	922,405,000	3,337,755,000	3,151,100,836	186,654,164
2	Biro Humas dan Protokol	10,841,268,550	3,911,716,750	14,752,985,300	13,472,199,037	1,280,786,263
3	Biro Kesramas	9,568,145,000	585,785,000	10,153,930,000	9,905,088,162	248,841,838
4	Biro Keuangan	6,466,401,850	200,000,000	6,666,401,850	6,132,475,100	533,926,750
5	Biro Asset dan Kekayaan Daerah	7,546,221,150	493,052,550	8,039,273,700	7,609,324,679	429,949,021
6	Biro Organisasi	1,765,252,700	1,300,260,500	3,065,513,200	2,451,323,350	614,189,850
7	Biro Umum	44,379,075,000	14,814,823,650	59,193,898,650	50,939,161,499	8,254,737,151
8	Biro Ekbang dan SDA	3,738,291,000	363,000,000	4,101,291,000	3,797,806,040	303,484,960
9	Biro Pemerintahan	3,672,657,000	(658,500,000)	3,014,157,000	2,921,913,541	92,243,459
	J U M L A H	292,099,138,713	74,745,552,070	1,473,972,213,154	1,362,647,931,574	111,324,281,580

Sumber : Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) SKPD tahun 2012

Dari tabel di atas, tercatat bahwa dari total anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi yakni Rp. 1.473.972.213.154,- yang didistribusikan kepada 46 SKPD, ternyata dapat



teralisasi sebesar Rp. 1.362.647.931.574,-. Dengan demikian, realisasi anggaran APBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2012 mencaai 94,39 persen dan terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 111.324.281.580,-

APBD Provinsi Jambi pada Tahun 2012, apabila dilihat dari realisasi komposisi anggaran terlihat bahwa **belanja tidak langsung** sebanyak Rp. 2.558.369.775.995,46 (92,47%) sedangkan **belanja langsung** sebanyak Rp. 1.363.493.137.510,- (92,71%). Besarnya komponen belanja tidak langsung tersebut, banyak terserap pada pembiayaan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, yaitu untuk membiayai program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan kapasitas aparatur. Oleh karena itu ke depan secara bertahap, komposisi belanja langsung harus dinaikan prosentasenya, agar kinerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Jambi yang ekonomi maju, aman, adil dan sejahtera dapat segera terwujud.

Selanjutnya apabila dilihat dari postur pendapatan daerah dengan belanja daerah, terlihat bahwa pendapatan Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2012 yang semula ditargetkan sebesar Rp. 2.181.289.285.429,- dalam realisasinya tercapai sebesar Rp. 2.662.714.087.256,17 atau (122,07%). Sementara itu, jika dilihat dari besarnya APBD pada Tahun 2012 maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai potensi untuk mandiri dalam pembiayaan anggaran belanja daerah.

Oleh karena itu, kedepan perlu dilakukan peningkatan *diversifikasi* sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Pemerintah Jambi sebagai Provinsi yang mandiri segera terwujud.

Berkaitan dengan tingginya PAD Pemerintah Provinsi Jambi, permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana mengelola anggaran pendapatan tersebut agar betul-betul efektif dan efisien, sehingga visi Pemerintah Provinsi Jambi yaitu Jambi EMAS : **Ekonomi Maju, Aman, Adil, dan Sejahtera** dapat cepat terealisasi.

Kemudian apabila dicermati dari komposisi anggaran dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja sasaran berdasarkan urusan pemerintahan, walaupun tidak selalu berkorelasi positif, namun terlihat bahwa terjadinya *performance gap* pada beberapa urusan pemerintahan ternyata bila dicermati anggarannya relatif kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada beberapa indikator kinerja yang tertuang dalam sasaran yang tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan, maka perlu peningkatan anggaran pada indikator kinerja tersebut.